



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT, DIRJEN PERKERETAAPIAN,
KEPALA BPTJ, DAN KEPALA BPSDM-P
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 5 Juli 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. (F-PPP) – Wakil
Ketua Komisi V DPR RI
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2023 sampai bulan Mei 2023
2. Membahas rencana alokasi anggaran
menurut fungsi, program, dan prioritas
anggaran K/L Tahun Anggaran 2024 masing-
masing unit Eselon I
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR
RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
22 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
5 dari 12 orang Anggota
1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
2. Ir. Sudjadi
3. Sri Rahayu
4. Harvey B. Malaihollo
5. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos.,
MCOMN&MEDIAS
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
3 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
2 dari 7 orang Anggota

1. Ir. Sumail Abdullah
2. Sudewo, S.T., M.T.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
1 dari 6 orang Anggota
1. Roberth Rouw

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
3 dari 6 orang Anggota
1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.AP.
2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
2. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si
3. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
1 dari 5 orang Anggota
1. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
2 dari 4 orang Anggota
1. H. Boyman Harun, S.H.
2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI (Drs. Hendro Sugiatno, M.M.)
2. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI (Ir. Mohamad Risal Wasal, ATD., MM., IPM)
3. Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Drs. Agung Raharjo, M.T)
4. Kepala BPSDM-P Kementerian Perhubungan RI (Dr. Ir. Djoko Sasono, M.Sc)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com):

Kita mulai ya.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI

**Yang saya hormati Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Dirjen Perkeretaapian, kemudian Sekretaris Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, dan seluruh Kepala Balai yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini
Hadirin hadirat yang saya hormati.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan yang maha esa yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan rapat RDP pada pagi hari ini.

Sebelum saya memulai, menurut laporan dari Sekretariat Komisi V, saat ini rapat Komisi V dihadiri oleh 25 orang anggota, jumlah Fraksi 8, artinya bahwa rapat ini sudah memnuhi kuorum dan izinkan saya untuk membuka rapat ini.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.50 WIB)

Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Sebagaimana undangan telah disampaikan pada RDP hari ini diagendakan membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dan rencana alokasi anggaran menurut fungsi program prioritas anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun Anggaran 2024 masing-masing unit Eselon I.

Bapak-Ibu, hadirin-hadirat yang saya hormati.

Pada rapat kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan pada hari selasa tanggal 6 Juni 2023 waktu itu telah disepakati beberapa hal diantaranya pagu indikatif Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 38,77 triliun, dari alokasi pagu indikatif tersebut, alokasi anggaran untuk Dirjen Perhubungan Darat adalah sebesar 6,642 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain:

- Dukungan IKN,
- Dukungan kawasan strategi pariwisata nasional,
- Pembangunan fasilitas keselamatan jalan,
- Layanan keperintisan,
- Subsidi angkutan jalan, penyeberangan dan multimoda, serta

- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur.

Selanjutnya alokasi anggaran untuk Dirjen Perkeretaapian adalah sebesar 9,685 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain. Pembangunan dan peningkatan prasarana kereta api, peningkatan keselamatan, keperintisan di tujuh lintasan serta kegiatan pendukung IKN.

Kemudian alokasi anggaran untuk BPSDMP adalah sebesar 3,684 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana.

Selanjutnya Badan Pengelola Transportasi Sejabotabek mendapat alokasi sebesar 329 miliar, yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: Subsidi akuntan penumpang, fasilitas sistem keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan.

Sejalan dengan itu pada kesempatan ini kami tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan pagu anggaran tahun 2024 agar tiap-tiap unit organisasi Organisasi Eselon I dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V, yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

Selanjutnya terdapat sejumlah permasalahan strategis yang saya kira perlu mendapatkan perhatian dari Dirjen dan Kepala Badan antara lain:

1. Bagaimana strategi optimalisasi daya serap anggaran pada Dirjen Darat, Dirjen Perkeretaapian, BPSDMP dan BPTJ berdasarkan RPJMN 2020-2024 di Kementerian Perhubungan. Itu yang pertama Pak.
2. Dukungan Dirjen perkeretaapian, Dirjen Darat, BPSDMP dan BPTJ terhadap program strategis nasional untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas tingkat layanan serta keselamatan dan keamanan yang berdampak terhadap penurunan biaya logistik, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Pembangunan fasilitas integrasi antara stasiun dan terminal, serta pelabuhan penyeberangan.
4. Perlunya peningkatan kualitas SDM perhubungan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang dapat mengembangkan inovasi dan profesionalitas.

Saudara-saudara yang kami hormati.

Saya kira demikianlah pengantar dari kami, selanjutnya kami persilakan kepada yang pertama Pak Dirjen Perhubungan Darat, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Dirjen Perkeretaapian, kemudian Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, lalu Pak Sekretaris Kepala Badan.

Saya persilakan waktu dan tempatnya kepada Pak Dirjen, silakan Pak.

**DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V DPR RI, para wakil Pimpinan Komisi V, dan anggota Komisi V DPR RI, serta hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pada hari yang berbahagia ini tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha besar atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi V DPR yang terhormat, dengan agenda:

1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023.
2. Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas pagu indikatif Dirjen Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2024.

Dapat kami sampaikan bahwa kami juga turut menghadirkan para Eselon II di lingkungan Dirjen Perhubungan Darat, serta Kepala unit kerja dan BPTD di lingkungan Dirjen Perhubungan Darat yang sekarang berjumlah 33 BPTD dari sebelumnya 25 BPTD dan hadir secara fisik di ruangan ini. Pertemuan ini tentunya juga merupakan kelanjutan dari rapat kerja bersama Menteri Perhubungan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023. Masukan dari anggota dewan pada saat rapat kerja telah kami pelajari untuk dilakukan proses tindak lanjut.

Bapak Pimpinan dan Wakil Pimpinan Komisi V, serta para Anggota Komisi V DPR yang terhormat.

Pada kesempatan yang sangat baik ini izinkanlah kami menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dari pagu sebesar 5,804 triliun, realisasi penyerapan keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023 berdasarkan e-monitoring sampai dengan tanggal 30 Juni sebesar 2,218 triliun atau 38,22%, ini lebih besar dari target prognosa di bulan Juni sebesar 34,12%.

Selanjutnya kami laporkan bahwa realisasi PNBPN Dirjen Perhubungan Darat dalam empat tahun terakhir yaitu mulai tahun 2019-2022, realisasi PNBPN per jasa pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni adalah sebesar 692,7 miliar atau 48,2% dari target total PNBPN sebesar 1,442 triliun. Kami akan terus mengupayakan secara terus-menerus untuk percepatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang dapat mendukung pencapaian target PBNPN di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Tahun Anggaran 2023 antara lain: Penerimaan tiket layanan angkutan perkotaan atau *buy the service*, penjualan kendaraan bermotor yang sudah mulai ada peningkatan setelah pasca pandemi covid, dan penerimaan jasa

transportasi laut dari pengalihan wewenang sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Perhubungan.

Selain itu perlu kami sampaikan juga bahwa pada tahun 2023 unit kerja BPLJSKP di Bekasi ini sudah disahkan menjadi Badan Layanan Umum. Sehingga terdapat pagu PNBPN yang dialihkan menjadi PNBPN BLU. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari BPLJSKP Bekasi menjadi Unit Kerja Pengujian Kendaraan Bermotor yang lebih baik, lebih profesional dan memiliki daya saing secara internasional.

Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan Komisi V dan seluruh Anggota Komisi V yang terhormat.

Sebagai agenda selanjutnya izinkan kami memaparkan program kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada pagu indikatif Tahun Anggaran 2024. Sesuai dengan tema RKP di 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari tujuh prioritas nasional pembangunan dan pelayanan sektor Perhubungan Darat memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam peningkatan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Penyusunan rencana kerja dan anggaran di Dirjen Perhubungan Darat pada empat tahun terakhir mengalami fluktuasi antara lain dipengaruhi oleh beberapa perubahan pendapatan negara dan kebijakan Pemerintah dalam respon dari dampak yang kemarin kita lalui bersama yaitu Covid-19.

Selanjutnya penyusunan-penyusunan RKL Tahun Anggaran 2024 pada pagu indikatif Dirjen Perhubungan Darat sebesar 6,642 triliun, ada peningkatan 1 triliun dibandingkan tahun 2023. Sebagaimana surat dari Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 10 April 2023 dan surat Menteri Perhubungan tanggal 18 April 2023. Komposisi tersebut disusun berdasarkan kaidah-kaidah serta skala prioritas, di mana komposisi belanja operasional sebesar 1,122 triliun dan belanja non operasional sebesar 5,520 triliun. Jika berdasarkan komposisi per jenis belanja pagu indikatif sebesar 6,642 triliun. Ini terbagi menjadi belanja pegawai sebesar 560,02 miliar, belanja barang 3,635 triliun atau 54,73%, belanja modal 2,447 triliun.

Untuk program penyelenggaraan transportasi darat ini terdiri dua program yaitu:

1. Program infrastruktur konektivitas Dirjen Perhubungan Darat, yaitu sebesar 5,549 triliun dengan rincian:
 - Infrastruktur konektivitas transportasi darat sebesar 2,543 triliun.
 - Pelayanan transportasi darat sebesar 1,154 triliun.
 - Untuk keselamatan dan keamanan sebesar 1,215 triliun, dan
 - Untuk penunjang teknis transportasi darat sebesar 636 miliar.
2. Sedangkan untuk program dukungan manajemen adalah sebesar 1,092 triliun. Kalau program dukungan manajemen ini terdiri dari gaji, tunjangan pegawai dan layanan perkantoran.

Secara singkat kami sampaikan rincian kegiatan per program sebagai berikut:

1. Kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi darat terdiri dari kegiatan yang memiliki program dalam mendukung konektivitas baik dari segi penyediaan infrastruktur, sarana, serta pelayanannya dengan total anggaran sebesar 2,543 triliun. Kegiatan dalam program ini adalah:
 - 1) Pengadaan bus sedang sebanyak 150 unit.
 - 2) Penyelenggaraan layanan keperintisan angkutan jalan, perkotaan BTS antar modal keperintisan angkutan barang, keperintisan angkutan penyeberangan, LDF, selama satu tahun sebesar 1,493 triliun.
 - 3) Pembangunan terminal tipe A baru di Mandai, ini pembangunan shelter terintegrasi moda dan lanjutan di 6 lokasi yang lainnya.
 - 4) Pembangunan pelabuhan penyeberangan baru di 4 lokasi.
 - 5) Pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan di 10 lokasi.
 - 6) Pembangunan pelabuhan sungai baru di 4 lokasi.
 - 7) Pembangunan pelabuhan sungai lanjutan di 4 lokasi.
 - 8) Pembangunan pelabuhan danau lanjutan di satu lokasi, dan
 - 9) Pembangunan halte sungai di 10 provinsi yaitu: Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara dan Sulawesi Tengah.

2. Program pelayanan transportasi darat terdiri dari beberapa kegiatan yang fokus dalam meningkatkan pelayanan Perhubungan Darat sebesar 1,154 triliun dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan sistem angkutan umum massal, ini bersumber dari PHLN, ini untuk pengembangan di kota Medan dan Bandung.
 - 2) Rehabilitasi peningkatan revitalisasi terminal penumpang tipe A yang terdiri dari 12 lokasi.
 - 3) Pengadaan dan pemasangan perangkat *local port service* di 8 lokasi.
 - 4) Operasional satuan pelayanan Dirjen Perhubungan Darat, yaitu terminal tipe A, terminal barang internasional dan pelabuhan ASDP, ini ada sejumlah 449 satuan pelayanan.
 - 5) Rehabilitasi pelabuhan penyeberangan yang terdiri dari 8 lokasi.
 - 6) Rehabilitasi pelabuhan sungai yang terdiri dari 2 lokasi.

3. Program keselamatan dan keamanan transportasi. Terdiri dari beberapa kegiatan yang fokus dalam peningkatan keselamatan dan keamanan Perhubungan Darat, baik di transportasi jalan maupun transportasi penyeberangan, ini dialokasikan anggaran sebesar 1,215 triliun. Beberapa kegiatan dalam program ini adalah:
 - 1) Pengadaan dan pemasangan pemeliharaan bantuan teknis perlengkapan jalan di 33 Provinsi, serta penanganan lokasi rawan kecelakaan.
 - 2) Pembangunan UPPKB di 3 lokasi.
 - 3) Rehabilitasi UPPKB di 8 lokasi.
 - 4) Operasional UPPKB di 135 satuan pelayanan.

- 5) Peningkatan keselamatan transportasi darat. Ini terdiri dari pengadaan alat uji kendaraan bermotor, ZOS zona aman sekolah, pekan nasional keselamatan jalan dan pengadaan alat kalibrasi pengujian kendaraan bermotor.
 - 6) Pengadaan fasilitas keselamatan di wilayah perairan ASDP yang terdiri dari pengadaan dan pemasangan rambu sungai, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana bantuan navigasi pelayaran.
4. Program penunjang teknis transportasi darat dengan anggaran 636,02 miliar. Ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
- 1) Pengadaan blanko sertifikat uji tipe dan pencetakan buku lulus uji berkala.
 - 2) Pendukung tupoksi Dirjen Perhubungan Darat.
 - 3) Tugas pokok dan fungsi Dirjen Perhubungan Darat.
 - 4) Penyusunan dokumen perencanaan teknis.
5. Dukungan manajemen Dirjen Perhubungan Darat dengan total anggaran 1,092 triliun. Ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
- 1) Gaji, tunjangan.
 - 2) Pemugaran gedung pelayanan.
 - 3) Layanan perkantoran.

Bapak Pimpinan dan wakil Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang terhormat.

Selanjutnya dapat kami sampaikan daftar kegiatan di Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan menjadi kegiatan prioritas nasional, ini total adalah 2,920 triliun yaitu:

- 1) Infrastruktur konektivitas transportasi darat sebesar 1,855 triliun.
- 2) Pelayanan transportasi darat sejumlah 377,75 miliar
- 3) Keselamatan dan keamanan transportasi darat sebesar 681,67 miliar.
- 4) Penunjang teknis transportasi darat sebesar 5,5 miliar.

Pada kesempatan ini kami turut menyampaikan prioritas-prioritas dalam penyusunan program kerja tahun 2024, dimana program prioritas terdiri dari, mohon maaf program prioritas tersebut menjadi agenda utama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun pemenuhan target sebagaimana amanah RPJMN dan Renstra. Adapun program tersebut antara lain:

- 1) Dukungan 10 kawasan strategis pariwisata nasional sebesar 112,3 miliar.
- 2) Dukungan ibukota negara sebesar 86,8 miliar.
- 3) Penyelesaian pembangunan infrastruktur di Dirjen Perhubungan Darat sebesar 916,5 miliar.
- 4) Dukungan *buy the service* di 10 kota 500 miliar, dan
- 5) Implementasi angkutan masal perkotaan ini melalui dana PHLN sebesar 60 miliar, ini untuk pengembangan BRT di Medan dan di Bandung.

- 6) Layanan keperintisan angkutan jalan, angkutan penyeberangan, layanan LDF angkutan antar moda dan angkutan barang di 33 Provinsi sebesar 943,51 miliar.
- 7) Pembangunan fasilitas keselamatan jalan di 33 Provinsi sebesar 720,46 miliar.

Selain itu dapat kami sampaikan pula bahwa dari kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibangun Dirjen Perhubungan Darat terdapat beberapa kegiatan dengan sumber anggaran dari SBSN sebanyak 14 kegiatan dengan total anggaran 345,46 miliar, yang terdiri dari 7 kegiatan pembangunan atau rehabilitasi pelabuhan ASDP dan 7 kegiatan revitalisasi terminal tipe A. Melalui kegiatan yang dilaksanakan di 33 Provinsi dan 318 Kabupaten/Kota, target pagu kegiatan Diren Perhubungan Darat terkait dengan program padat karya di tahun 2024 adalah sebesar 2,862 triliun, dengan target biaya upah sebesar 21,41 miliar.

Pimpinan dan Wakil Pimpinan, serta para Anggota Komisi V DPR yang terhormat.

Kami menyadari usulan kegiatan Tahun Anggaran 2024 masih belum mampu memenuhi banyak kebutuhan masyarakat akan kehadiran pelayanan jasa transportasi khususnya darat. Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada kami melakukan pemilihan kegiatan secara proporsional berdasarkan prioritas kebutuhan dan usulan yang memiliki kelengkapan persyaratan dokumen dan data dukung. Terhadap saran dan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR telah kami pelajari dan kami tindak lanjuti.

Demikian penjelasan secara umum yang dapat kami sampaikan terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan program kerja Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya kami mohon berkenan dukungan dan saran Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat guna peningkatan pelayanan transportasi darat yang lebih baik kepada masyarakat.

Sekian terima kasih.

Wabillahitaufiq walhidayh.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih waktu kami kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih Pak Hendro atas paparannya. Kemudian kami persilakan kepada Muhammad Rizal, Pak Dirjen untuk memberikan paparannya, silakan Pak.

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Baik terima kasih Pak Pimpinan.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi V DPR RI,
Wakil Ketua Komisi V DPR RI dan segenap Anggota Komisi V.
Pak Dirjen Darat, Kepala Badan BPSDM dan Kepala BPTJ serta rekan-
rekan sekalian.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan yang kami hormati, izinkanlah pada hari yang berbahagia ini kami melaporakan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan pembahasan program kerja tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pertama sebagai perawalan dari kami, kami sampaikan bahwa penyusunan RAPBN Tahun 2023 telah mengalami perkembangan dari pagu awal sebesar 7,34 triliun menjadi sebesar 7,4 triliun, 7,43 T di mana terjadi penyesuaian tambahan berupa adanya tambahan saldo awal BLU sebesar 43,3 miliar dan luncturan SBSN yang tidak salah tahun 2022 sebesar 44,8 miliar.

Pagu Direktorat Jenderal Perkertaapian pada tahun 2023 sebesar 7,43 triliun telah terserap sebsesar 2,27 triliun atau sekitar 3,54% dengan rincian penyerapan per jenis belanja dan per sumber dana sebagaimana di dalam layar ini Bapak dan memang kami mengakui penyerapan kami masih jauh dari target, hal ini dikarenakan beberapa hal :

1. Adanya IMO Pak, IMO (*infrastructure maintance obligation*) dengan PT. KAI yang belum kita bayarkan karena kami belum berkontrak, menunggu kebijakan antar Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan terkait besaran IMO yang harus kami bayarkan.
2. Adanya penyerapan PHLN Pak yang masih menunggu terhadap untuk Jabotabek *Capacity Enhancement* Fase satu untuk penyesuain perubahan jadwal terhadap kedatangan tenaga ahli asing yang dari luar.
3. Yang ketiga ini yang sudah menjadi permasalahan kami adanya masalah hukum di beberapa anggota kami yang masih berproses, sehingga beberapa kegiatan kami evaluasi ada yang terpaksa kami harus kurangi dan harus kami hentikan. Selanjutnya ada lelang yang ulang yang kami lakukan terhadap pengadaan material rel dan wesel dan ini berdampak terhadap peningkatan pembangunan jalur kereta api hingga masih menunggu dari kedatangan material tersebut dan yang terakhir adalah adanya kegiatan direktif Pak, sehingga beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya dan saat ini dilakukan proses revisi untuk pemenuhan direktif tersbut. Ini yang membuatkan saat ini penyampaian penyerapan kami belum terlalu mencapai target yang kami inginkan.

Selanjutnya Bapak dapat kami laporkan bahwa pada pelaksanaan kegiatan padat karya di bidang perkeretaapian pada tahun 2023. Pada paket pekerjaan konstruksi kegiatan padat karya ini mengacu pada Permenhub

nomor 73 tahun 2018 yang dilaksanakan sebagai bagian dari lingkup pekerjaan pembangunan dan peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur dan bangunan serta fasilitas operasi. Kegiatan padat karya ini pada tahun 2023 tersebar di 11 Provinsi, ada di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Sulawesi Selatan dengan 37 Kabupaten/Kota. Sehingga saat ini realisasi biaya upah kegiatan padat karya tahun 2023 sudah terserap 2,99 miliar atau sebesar 56%, sedangkan realisasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.050 orang atau sebesar 101% yang mana melebihi target dari yang dicanangkan.

Selanjutnya kami sampaikan realisasi padat karya tahun 2023 pada tiap bulan kerja di lingkungan Dirjen Perkeretaapian sebagaimana di layar Pak, ini masing-masing balai yang melaporkan target dari masing-masing perkembangan padat karya yang mereka lakukan.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V yang kami hormati.

Selanjutnya kami sampaikan terkait rencana kerja anggaran tahun 2024. Berdasarkan dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020-2024. Target panjang jalur kereta komulatif pada tahun 2024 ada sebesar 7.451 km Sepur. Dimana target yang telah tercapai sampai tahun 2022 ini kami telah membangun sebanyak 6.642 km Sepur. Dengan target kondisi jalur kereta api dengan TQI katagori 1 dan 2 dan pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 94% dan pada tahun 2022 sudah tercapai sebesar 91,7%. Selanjutnya juga terhadap jumlah kota metropolitan dengan SAUM (sistem angkutan umum massal) perkotaan berbasis rel. Ada 6 kota Pak Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan dan Makassar, ditargetkan pada tahun 2024 sebanyak 6 kota itu selesai, pada tahun 2022 kami sudah selesai di 4 kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan.

Terkait dengan rasio kejadian kecelakaan kereta api, kami mempunyai target per 1 juta kilometer tempuh pada tahun 2024 kami targetkan sebesar 0,22. Pada Tahun 2022 kami sudah mencapai posisi 0.17%, artinya *insya Allah* di 2024 bisa kami lebih perkecil lagi target terhadap rasio kejadian kecelakaan. Terhadap *ratio on time performance* di tahun 2024 targetnya 82%, sedangkan tahun 2022 ini kami sudah mencapai 91%, artinya *insya Allah* di 2024 juga kami akan lebih meningkatkan OTP-nya melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Bapak-Ibu Pimpinan sekalian,

Pimpinan kemungkinan berdasarkan rencana kerja Pemerintah RKP tahun 2024 dengan tema mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian prioritas nasional terdapat tiga *major* proyek di bidang perkeretaapian yaitu. Pembangunan kereta Makassar-Parepare, dukungan fasilitas perkeretaapian antara Padalarang-Bandung untuk operasional KA *Feeder* Kereta Cepat dan sistem angkutan umum metropolitan SAUM di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang,

Makassar. Untuk ini posisinya sudah kami laksanakan Pak tadi sudah tampilkan 4 kota sudah berjalan nanti ke depan ada 2 kota lagi akan tuntaskan untuk SAUM di perkotaan.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan sesuai Renstra selain dalam memenuhi target dan mengakomodir *backlock* pembangunan, dibutuhkan pendanaan sebesar 28,34 triliun. Yang selanjutnya setelah dilakukan penelaahan untuk mencoba mencari realisasi dalam pencapaian target menghasilkan kebutuhan sebesar 15,03 triliun. Namun setelah kami lakukan penelaahan kembali menghasilkan angka indikatif untuk tahun 2024 sebesar 9,68 triliun, dengan komposisi sebagaimana ini Pak Untuk posisi dari pada pagu indikatif di tahun 2024. Selanjutnya,

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati.

Kami sampaikan postur pagu indikatif tahun 2024 Dirjen Perkeretaapian dengan total alokasi sebesar 7,43 triliun dengan rincian. Pertama belanja pegawai sebesar 141,53 miliar, kedua belanja barang operasional sebesar 105,82 miliar, belanja barang non operasional sebesar 2,77 triliun dengan mengakomodir kegiatan pengoperasian dan perawatan pelaksanaan kereta api, pembayaran *availability payment* untuk rel kereta api Makasar-Parepare, dukungan terhadap IKN, keperintisan kereta api dan angkutan motor gratis pada masa angkutan lebaran, pemenuhan *readiness criteria*, penguatan fungsi regulator, serta kegiatan operasional pelayanan dan perawatan. Untuk belanja modal dengan sumber dana rupiah murni sebesar 261,54 miliar dengan mengakomodir kegiatan dengan skema *multiyears* kontrak dan pemenuhan *readiness criteria* dan pelaksana organisasi. Belanja modal dengan sumber dana SBSN sebesar 6,31 triliun dengan mengakomodir kegiatan lanjutnya pada tahun sebelumnya dan beberapa kegiatan baru. Selanjutnya belanja modal dengan sumber modal PHLN sebesar 15,45 miliar dan terakhir belanja barang dan modal dengan sumber dana BLU sebesar 74 miliar.

Pimpinan dan segenap Anggota,

Selanjutnya kami sampaikan *highlight* prioritas kegiatan tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pertama ada 11 kegiatan pembangunan prasarana kereta api antara lain pada lintas Mandai-Palandro, jalur ganda Solo Balapan-Kalioso, Medan-Binjai, jalur ganda Kiaracandong dan Cicalengka, jalur ganda Mojokerto sepanjang *underpass* dengan (suara kurang jelas) Jatibarang, Padalarang-Bandung, Gadotraksi, Delunggu, kewjipan ap Makasar, Parepare dan pembangunan fasilitas kerawatan keasetan, pengadaan material rel dan *rest area* 54.

Kedua, ada 19 kegiatan peningkatan kapasitas prasarana perkeretaapian terdiri dari:

1. Peningkatan jalur kereta api, antara lain pada segmen Labuan-Belawan, kisanan, mambang muda, mambang muda padang halapan, padang bukit putus, paulima, Jember-Kalisat, Maos-Cilacap, Solo-Wonogiri,

- Kertasemaya-Arjawinangun, Tarahan-Tanjung Henim dan pada *commuterline* Kemayoran-Tanjung Priok.
2. Pembangunan fasilitas perkeretaapian di antaranya pada stasiun Tanah Abang, stasiun Rangkasbitung dan pada lintas Manggarai-Jatinegara.
 3. Peningkatan fasilitas operasi perkeretaapian pada lintas Prupuk-Purwokerto, Tegal-Pekalongan, Kertasono-Talun dan sistem elektrifikasi perkeretaaan di Jabodetabek.
 4. Peningkatan jembatan pada lintas Kisaran-Tanjung Balai, Kras-Ngadiluwih dan Temuguruh-Singojuruh.

Selanjutnya ada 7 kegiatan peningkatan keselamatan perkeretaapian terdiri dari *infrastructure maintenance operation*, kegiatan penanganan perlintasan sebidang, penanganan daerah rawan dan jembatan tarahan Tanjung Henim, penanganan rintang jalan dan peningkatan 5 BH lintas Lubuk Halung Hayutanam, 2 BH Tarahan dan Tanjung Henim dan penanganan lintang jalan lintas Banjar Kroya segmen Kawung Ganten dan Jeruk Legi dan peningkatan 2 BH KA lintas Prupuk-Purwokerto serta sosialisasi keselamatan perkeretaapian.

Selanjutnya ada 3 kegiatan yang mendukung IKN yaitu Studi Amdal jalur kereta api bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan menuju IKIP IKN. Yang kedua studi Amdal jalur kereta api perkotaan Balikpapan menuju IKIP IKN, dan yang ketiga SID untuk kereta antar Kota Trans Kalimantan dan Kalimantan Timur.

Kelima, kegiatan perintis kereta api pada 7 lintas layanan antara lain pada lintas Muara Satu-Kuta Blang, Tebing Tinggi-Lalang, Binjai-Besi Tang-Sei Liput, Lubuk Alung-Kayu Tanam, LRT Sumatra Selatan, KA Makasar-Parepare dan Rantauprapat-Pondok Aslima.

Keenam, penyiapan *readiness criteria* antar lain untuk penyiapan dokumen perencanaan KA perkotaan di Jabodetabek dan Surabaya. Ada satu yang belum masuk nanti Pak Lhokseumawe nanti akan kami tambahkan untuk kereta yang ke arah Lhokseumawe.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V DPR yang saya hormati.

Selanjutnya kami akan menyampaikan indikasi kegiatan padat karya tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 8 Balai adalah Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yang direncanakan melibatkan tenaga kerja sebanyak 1.020 orang atau sebanyak 100.064 orang per hari yang diproyeksikan akan menyerap upah sebanyak Rp11.111.000.000 dan diharapkan kegiatan ini dapat akan ikut membantu program pemulihan ekonomi nasional, membantu rakyat menengah kebawah yang berada disekitar lokasi pekerjaan dan pembangunan perkeretaapian.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi V DPR yang kami hormati.

Demikian secara umum kami sampaikan terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan program rencana kerja tahun 2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selanjutnya mohon perkenan dukungan, saran dan masukan segenap anggota Komisi V DPR RI yang terhormat guna mewujudkan penyediaan pelayanan transportasi kereta api yang efektif, efisien, terjangkau bagi masyarakat dan mampu menjawab tantangan kedepan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Muhammad Rizal. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Joko, Kepala BPSDM, silakan Pak.

KEPALA BPSDM-P KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Dr. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc):

Siap Bapak.

Bismillahirrohmanirrohim

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI.
Yang terhormat Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, BPTJ dan Ibu-Bapak sekalian.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
**Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita,
Om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.**

Izinkan kami melaporkan tentang kinerja Tahun Anggaran 2023, sebelumnya kami melaporkan bahwa hadir bersama kami hampir semua Kepala Satuan Kerja baik di pusat maupun yang di UPT secara fisik. Untuk itu kami nanti mengharap adanya bantuan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V.

Pagu akhir BPSDM Perhubungan adalah 3,8 triliun dari pagu awal 3,6 dapat tambahan 134 miliar. Pagu ini bersumber dari rupiah murni sebesar 58,19%, kemudian diikuti oleh PNBPN BLU sebesar 34,1% serta SBSN adalah 6,84%. Pagu ini digunakan untuk belanja barang operasional sebesar 53,8% dilanjutkan dengan belanja modal 19,49%, serta belanja barang operasional sebesar 19,78 (suara kurang jelas) dan sisanya adalah 8,45% untuk belanja pegawai.

Berdasarkan catatan kami per 30 Juni, *alhamdulillah* BPSDM Perhubungan dapat mencatatkan 36,45%, kinerja keuangannya di mana 1,15% diatas prognosa tahun 2023. Dari kegiatan yang kontraktual yang kami miliki ada 113 paket atau setara dengan 648 miliar, di mana 89 paket sudah kontrak kemudian dalam proses tender itu sebesar 8 paket dan juga 7 paket, serta *e-Purchasing* sebesar 9 paket.

Saat ini kami melaporkan bahwa berdasarkan penerimaan PNBPN BLU yang menjadi sumber biaya dari anggaran BPSDM Perhubungan adalah sampai hari ini kami sudah mencatatkan 43% penerimaan itu untuk PNBPN. Sedangkan untuk BLU kita sudah mencapai 50,01% dan totalnya dari PNBPN sudah 5,2%. Pemanfaatannya penggunaan PNBPN BLU sampai saat ini kami untuk PNBPN sudah dicapai sekitar 37,34% dari pagu yang sudah ditetapkan, kemudian untuk BLU sebesar 3,7%. Secara total PNBPN BLU sebesar 30,73%.

Terkait dengan pelaksanaan anggaran ini ya kami melaporkan ada tiga IKK. Jadi jumlah peserta Diklat terpenting yang sudah kita capai adalah 69,1% atau 198.052 orang, sedangkan persentase Diklat dalam persaingan kompetensi adalah 51,58%, serta persentase penyerapan lulusan Diklat pembentukan transportasi sampai saat ini adalah 65,23%.

Capaian kegiatan selain BPSDM Perhubungan untuk tahun 2023 ini sebesar 36,45% atau 694 miliar lebih. Terkait dengan pelaksanaan program Diklat penerimaan masyarakat BPM untuk tahun 2023 tersebar di semua sekolah-sekolah BPSDM Perhubungan, yang mana anggaran yang terserap saat ini baru 19%, sedangkan peserta yang sudah dicapai adalah 40%. Kami berharap bahwa nanti ada dukungan atau arahan dari pimpinan dan anggota Komisi V untuk bisa mengakselerasi kegiatan BPM ini. Secara data rinciannya dapat laporkan bagaimana tabel berikut.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI.

Kami juga ada program seperti padat karya tetapi ini ya bersifat untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fasilitas pendidikan. Tahun 2023 kita ada anggaran 6,1 miliar atau 16% dari pagu BPSDM. Ini kita gunakan untuk pemeliharaan dan perawatan jalan lingkungan, kemudian pemberian pagar lingkungan kampus, pemilihan taman dan lapangan lingkungan kampus, pembersihan lingkungan dalam dan luar kampus, serta perawatan gedung operasional kantor, asrama, rumah dinas dan sebagainya.

Izinkan kami lanjut untuk pelaksanaan anggaran rencana tahun 2024. BPSDM Perhubungan mendapat pagu indikatif sebesar 3,69 triliun. 32,74% adalah untuk program dukungan manajemen dan 67,26% adalah untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi. Dari anggaran tersebut ada empat belanja yang akan kami sasar.

1. Belanja barang operasional sebesar 17,1%.
2. Belanja pegawai sebesar 8,3% dan
3. Belanja non operasional sebesar 54,4%, serta
4. Belanja modal 19,23%.

Program strategis BPSDM tahun 2024 adalah sebesar ya antara lain adalah untuk kegiatan operasional sebesar 1,449 triliun, yang kemudian program diatas satker kita sebesar 1,086 triliun. Untuk kegiatan terkait dengan BPM untuk tahun 2024 kami merencanakan untuk bisa terserap 100.405 peserta dengan anggaran sebesar 248 miliar, dengan dilaksanakan oleh semua sekolah BPSDM dimana sementara ini *tentatively* kita bisa menyampaikan tentang lokasi-lokasi dan Provinsi sebagaimana berikut.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI.

Demikian yang dapat kami laporkan. Kami mohon arahan, dukungan dan juga mungkin bantuan untuk bisa melaksanakan program ini. Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam

Terima kasih Bapak Kepala BPSDM. Kemudian kami persilakan kepada Bapak Sekretaris Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, silakan Pak.

SEKRETARIS BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK (Drs. AGUNG RAHARJO, M.T.):

Iya terima kasih Bapak Pimpinan.

**Yang kami hormati Bapak dan Wakil Pimpinan serta Bapak-Ibu Anggota Komisi V,
Yang kami hormati Pak Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian,
Kepala Badan BPSDMP dan seluruh undangan.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Kepala Badan, karena pada saat yang bersamaan tidak dapat menghadiri acara hari ini karena menjalankan tugas sebagai Ketua Delegasi Kementerian Perhubungan pada acara *transport operation forum* di Korea. Dan mohon izin kami selaku sekretaris badan dapat menyampaikan paparan BPTJ.

Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang kami hormati.

Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan paparan dalam dua bagian. Yang pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan rencana alokasi anggaran tahun 2024. Pada bagian pertama terkait dengan pagu dan Kurva S penyerapan anggaran BPTJ tahun 2023, dapat kita lihat pada penetapan awalan DIPA tahun 2023 pagu BPTJ sebesar 259,71 miliar. Kemudian terdapat *automatic adjustment* sebesar 12,83 miliar, namun kemudian ada relaksasi *automatic adjustment* sebesar 2,4 miliar, sehingga pagu akhir BPTJ menjadi 249,28 miliar, paling kecil kita Pak.

Pada posisi realisasi anggaran BPTJ pada tanggal 30 Juni 2023 kita telah berada di 48,67%, ini telah berada di prognosa sebesar 36,10% sehingga kami optimis anggaran pada tahun 2023 dapat terserap sebesar 99,50%.

Untuk penyerapan anggaran per jenis belanja, untuk belanja pegawai telah mencapai 67% dan ini karena sudah di atas 50% dapat terindikasi bahwa BPTJ memerlukan penambahan belanja pegawai agar dapat terpenuhi sampai akhir tahun. Sedangkan untuk belanja barang dapat terealisasi sebesar 44% dan untuk belanja modal sebesar 36,39%.

Untuk rincian penyerapan 5 kegiatan. Untuk kegiatan dukungan manajemen terealisasi sebesar 53% dan ini sebagian besar untuk belanja pegawai dan untuk infrastruktur sebesar 25%, untuk pelayanan transportasi Jabodetabek sebesar 44%, untuk keselamatan sebesar 73% dan untuk penunjang teknis sebesar 31%.

Dapat kami sampaikan juga terkait dengan realisasi PNBPN termasuk ini juga yang baru saja menjadi PNBPN dari tarif pelayanan bus *buy the service* di kota Bogor dari target sebesar 8,49 miliar telah terealisasi sebesar 4,97 miliar atau sebesar 58,6%. Dalam tahun 2023 BPTJ mempunyai 5 kegiatan yang termasuk dalam prioritas nasional:

1. Peningkatan bangunan operasional Stasiun Pondok Rajeg.
2. Pelayanan *buy the service* angkutan di Kota Bogor.
3. Pembangunan ATCS terintegrasi di Jabodetabek.
4. Pengadaan alat counting terintegrasi di jalan nasional Jabodetabek.
5. Fasilitas keselamatan keamanan transportasi perkotaan.

Selain itu di BPTJ juga melaksanakan program padat karya antara lain untuk pembangunan ATCS, pembangunan jalur sepeda, pemasangan fasilitas keselamatan, kemudian padat karya di terminal yang dikelola oleh BPTJ, di Baranangsiang, Jatijajar, Pondok Cabe dan juga Poris Plawad. Di samping itu dalam rangka percepatan kami juga terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat.

Bapak Pimpinan, para Wakil Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang kami hormati.

Terkait dengan alokasi anggaran tahun 2024 kami telah mengusulkan anggaran sebesar 761 miliar, namun telah disetujui sebagaimana surat bersama Menteri Keuangan dan menteri PPN Bappenas sebesar 329,87 miliar sehingga terdapat *gap* sebesar 431,12 miliar, namun kemudian dibandingkan tahun tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 70,2 miliar. Dalam rangka memenuhi target KPI kami melakukan prioritas di tahun 2024 ini untuk integrasi layanan angkutan umum dan peningkatan keselamatan di Jabodetabek.

Pada tahun 2024 kita mempunyai dua program yaitu yang terkait dengan program dukungan manajemen. Untuk belanja modal sebesar 2,89 miliar, belanja barang non operasional 13,19 miliar, belanja barang operasional 35,74 miliar dan belanja pegawai sebesar 35,61 miliar. Sedangkan program infrastruktur konektivitas terdiri dari jenis belanja. Untuk belanja barang non operasional sebesar 161,34 miliar untuk 3 kegiatan prioritas nasional dan belanja modal sebesar 81,26 miliar untuk 5 Kegiatan prioritas nasional.

Dapat kami sampaikan pada tahun 2024 terdapat 5 prioritas-prioritas nasional dengan total anggaran sebesar 135,8 miliar dengan rincian:

1. Untuk subsidi angkutan penumpang *buy the service* di Jabodetabek.
2. Untuk reaktivasi stasiun gunung putri.
3. Pengadaan alat *counting* terintegrasi
4. Pembangunan ATCS terintegrasi, dan
5. Fasilitas sistem keselamatan dan kemandirian transportasi perkotaan.

Selain itu terdapat 7 kegiatan prioritas nasional dengan total anggaran 28,3 miliar antara lain:

1. Untuk sentralisasi lanjutan jalur fiber optik ATCS.
2. Pembangunan jalur sepeda di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.
3. Operasional empat terminal.
4. Ada sosialisasi *safety riding*.
5. Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru.
6. Pemutakhiran perangkat ATCS yang dulu dibangun pada tahun 2017, serta
7. Pendampingan rencana pengembangan proyek KPBU di wilayah Jabodetabek.

Selanjutnya kami sampaikan untuk program kerakyatan yang untuk mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim PPKE di wilayah Kota-kota Kabupaten di wilayah Jabodetabek. Kami merencanakan akan menyerap sebanyak 6.825 orang per hari dengan anggaran 1,023 miliar.

Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang kami hormati.

Demikian pokok-pokok pelaksanaan anggaran 2023 dan rencana anggaran tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Kiranya harapan kami

mohon arahan dan dukungan sepenuhnya kepada Bapak-Ibu sekalian agar kami dapat mewujudkan anggaran secara efisien, efektif dan tepat sasaran.

Terima kasih

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Bapak Sekretaris Badan.

Bapak-Ibu, hadirin-hadirat yang saya hormati.

Kita nanti jam 2 masih ada rapat lagi dengan beberapa Dirjen. Saya berharap teman-teman Komisi V bisa mengefektifkan waktu, sehingga harapan saya kita bisa selesai setengah 2 kemudian kita istirahat makan siang jam 2 kita bisa masuk lagi rapat. Di sini ada 14 penanya dari anggota, yang pertama saya persilakan Pak Sudewo, selanjutnya siap-siap Ibu Cen Sui Lan. Silakan Pak.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan kenapa yang pertama harus saya, saya nggak enak sama Pak Hamka ini. Terima kasih Pimpinan.

Saya nggak bisa membaca semua materi yang diberikan oleh mitra kerja kami yang ikut rapat kali ini karena banyaknya materi. Mumpung masih ingat ini yang terakhir tadi ya Kepala Badan Kebijakan Transportasi Jabodetabek ya. Di situ tadi diperlihatkan ada anggaran untuk subsidi BTS (*buy the service*). Ini sesungguhnya anggaran BTS ini dari institusi dari lembaganya saudara atau dari Perhubungan Darat itu ya, ataukah memang dua-duanya bisa seperti itu. Tadi oleh Perhubungan Darat menyampaikan tersedia sekitar 500 miliar untuk tahun 2024, kemudian dari BPTJ ada juga, mengapa dialokasikan seperti itu ya. Apakah ini *overlap* di luar koordinasi ataukah karena sudah ada koordinasi sehingga pembagian tugas, yang 500 miliar untuk yang mana yang tadi untuk yang mana gitu ya.

Kemudian juga ada anggaran sekian miliar untuk Terminal A di Depok, Terminal A di Tangerang. Untuk operasional sekian orang, sekian orang di terminal Depok sekian orang di terminal Tangerang. Ini kan juga ranahnya Perhubungan Darat ya ranahnya Perhubungan Darat, mengapa saudara masuk ke situ. Apakah ini tidak semestinya di Perhubungan Darat saja sehingga koordinasinya lebih mudah, karena semua organ di terminal itu adalah strukturalnya Perhubungan Darat. Kepala Terminal kemudian sampai kepada Kepala Balai itu adalah Perhubungan Darat. Fungsinya BPTJ itu adalah mengkoordinasi supaya segala kegiatan yang berada di terminal tersebut terkait dengan kota Jakarta atau yang kota lain di Jabodetabek itu menjadi lancar tapi apakah perlu harus ada penganggaran di situ juga ya.

Terus juga coba saya juga diberi satu penjelasan dari BPTJ sesungguhnya pokok persoalan yang dihadapi layanan transportasi darat Jakarta dan sekitarnya itu, itu apa saja pokok persoalannya sampai persoalan transportasi di Jabodetabek menjadi rumit seperti ini ya tidak lancar. Jadi saya tidak hanya ingin saudara menjelaskan punya anggaran sekian kemudian dipakai untuk kegiatan itu kegiatan itu kegiatan ini kegiatan tersebut itu kegiatan A B C D semuanya itu. Kira-kira memang mengatasi persoalan di lapangan atau tidak, menjadi sebuah solusi atau tidak. Ada satu perbandingan dari tahun ke tahun itu kira-kira dengan program-program tersebut menjadi lancar atau tidak transportasi di Jabodetabek. Karena badan ini merupakan terobosan yang bagus oleh Kementerian Perhubungan tapi memberikan hasil yang nyata atau tidak, identifikasi masalahnya seperti apa. Jangan hanya sekedar membagi-bagi uang untuk ATC, untuk A B C D membagi-bagi uang tapi itu tidak menyentuh pokok persoalan sehingga bukan sebagai solusi.

Coba jelaskan secara singkat saja pokok persoalan transportasi darat yang berada di Jabodetabek itu apa. Sehingga saya juga ingin tahu hadirnya badan ini bisa membantu memberikan kelancaran atau tidak. Dan parameter mengukur sebuah kelancaran, parameter sebuah keberhasilan transportasi darat di Jabodetabek itu apa saja, kelancaran, keselamatan, itu coba dijelaskan.

Kemudian yang kereta api, kereta api juga tadi sekilas saya mendengarkan pemaparan dari kereta api untuk belanja A B C D dan semuanya. Tapi menurut saya itu juga belum menyelesaikan pokok persoalan di lapangan. Misalnya isu yang berkembang sampai sekarang ini, akan adanya pemindahan Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai itu banyak sekali pokok persoalan di sana. Yang kapasitasnya memang belum memadai, yang apa itu parkirnya belum memadai, fasilitas penunjangnya belum memadai, yang untuk apa itu pintu keluar dan pintu masuknya itu aja masih sempit. Dan konon katanya pemindahan Gambir ke Manggarai itu sudah berdasarkan kajian tapi kajian tahun berapa. Setahu saya kalau saya ikuti dari media ini belum pernah ada pemaparan dari Direktorat Jenderal Kereta Api di Komisi V belum pernah.

Maka saya juga ingin mendengarkan secara resmi dalam forum ini yang saya ikuti hanya media. Bahwa kajian itu dilakukan tahun 1990, tentu waktu yang lama bila diimplementasikan sekarang, semua sudah tidak relevan lagi. Studi yang dilakukan di 90 implementasinya sekarang tentu sudah tidak relevan. Saya khawatir akan seperti di Kertajati, akan seperti di fasilitas perhubungan-perhubungan yang lain dipaksakan seperti itu. Jangan sekali-kali memaksakan satu kebijakan karena punya otoritas, karena punya kewenangan. Pokoknya ini kehendak saya, ini kewenangan saya, saya yang menentukan tanpa memperhatikan situasi dan kondisi, tanpa memperhatikan masukan-masukan yang berkembang.

Kalau memang betul itu akan dipindah di Manggarai, saya minta coba paparkan sebentar saja di sini studinya yang mana, dilakukan kapan dan dilakukan oleh siapa studi tersebut, karena menjadi keresahan masyarakat.

Kalau memang studi itu betul-betul valid dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa Manggarai itu layak untuk dilakukan menjadi stasiun besar antar kota antar Provinsi yang merupakan pemindahan dari Gambir. Saya belum melihat dari proyeksi anggaran 2024 yang dilakukan oleh kereta api apa yang dilakukan di Gambir nggak saya lihat *gitu*. Jadi ini kan kontradiktif dengan apa niatnya, kemudian dengan apa yang dilakukan. Niatnya tetap berada di Stasiun Gambir tapi tidak ada anggaran-anggaran, tidak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di stasiun, niatnya di Stasiun Manggarai tapi tidak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana, supaya Manggarai itu lebih siap. Nggak ada *blue print* kapan Manggarai siap di sini tidak ada.

Isu juga soal kereta api, ini tolong dijawab ini kan *positioning* kereta api dalam belanja gerbong yang heboh di media juga, mau pakai *second* dari Jepang atau mau beli dari INKA produk sendiri. Terkait dengan anggaran katanya di media juga Dirjen Kereta Api kereta api setuju katanya sudah ada usulan di Kementerian Perindustrian supaya pakai *second* dari Jepang, tapi Kementerian Perindustrian itu menolak dengan alasan bla bla bla. Semua saya kira dari kereta api sudah mengikuti tapi dalam rapat ini coba dijelaskan posisinya seperti apa. Dan dalam konteks kereta cepat kan kami sangat mendukung karena itu memang kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang punya pemikiran visioner, bahwa program itu tidak hanya disiapkan untuk sekarang tapi juga untuk yang akan datang. Masyarakat generasi yang akan datang mungkin baru bisa merasakan hadirnya itu, baik sekarang maupun yang akan datang begitu. Setuju itu dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung tapi belanja gerbongnya itu apakah memang mengacu pada keputusan Presiden nomor berapa itu saya nggak paham dengan tetap terhadap TKDN ya. Kalau belanja dari luar negeri itu tentu tidak memenuhi unsur TKDN tapi kalau belanja di dalam negeri apakah mampu satu-satunya industri gerbong kereta api yaitu INKA, itu coba dijelaskan ini sesungguhnya seperti apa. Bukan saya persoalan program kereta cepat Jakarta-Bandung nya tapi soal teknisnya.

Berikutnya adalah BPSDM. BPSDM ini saya sudah baguslah apa yang dilakukan oleh BPSDM itu. Memang menggodok anak-anak muda yang ingin mengabdikan di Kementerian Perhubungan maupun di industri melalui pola pembibitan maupun pola reguler. Dari semua bidang semua sektor di Kementerian Perhubungan ada sekolahnya, ada kampusnya dan saya kira sudah sesuai dengan *roadmap*-nya. Hanya saya berharap kepada Kepala BPSDM supaya pola pembibitan ini jangan terlalu ditekan dari tahun ke tahun, kalau bisa ditambah jumlahnya. Jadi ini linier dengan *blueprint* penerimaan ASN di BKN kalau bisa dikoordinasikan dengan BKN supaya memberi kesempatan kepada anak-anak yang punya prestasi tapi mereka tergolong ekonomi yang lemah gitu ya. Jadi pola pembibitan jangan dikurangi tiap tahun tapi kalau bisa malah ditambah, saya minta dikoordinasikan dengan BKN.

Lalu Perhubungan Darat. Saya hanya ngomong soal BTS (*buy the service*) ini realita di lapangan bukan asumsi, bukan persepsi, bukan *black campaign*, tapi ini realita di lapangan. Bahwa bus di 10 kota itu itu memang perlu ada evaluasi, bagaimana pemanfaatannya supaya lebih optimal. Jadi

jangan sampai bus itu kosong atau di bawah daripada target. Kalau saya dengar gitu ya kontraknya itu lucu, kontraknya itu mestinya berdasarkan penumpang. Berapa yang harus dibayar oleh Pemerintah terhadap bus transportasi kota ini, ini yang berdasarkan jumlah penumpang jangan didasarkan jarak. Kalau berdasarkan jarak ya dia nggak ada penumpangnya pun jalan yang penting dalam satu hari sekian jam itu mencapai jarak tertentu, target jarak ini terpenuhi. Nggak ada orangnya ya di berangkatkan, baru 2, 3 orang itu ya di berangkatkan, itu perlu dievaluasi. Dan upaya-upaya supaya betul-betul bus ini optimal pemanfaatannya itu juga harus dilakukan. Jangan kontrak terus dilepas begitu saja sehingga bus tersebut kosong.

Dalam *buy the service* ini kan di 10 kota yang tidak mungkin pergerakan dan kondisinya itu bisa dimonitor secara manual, perlu harus mengakomodir teknologi. Kemudian bagaimana juga bus pariwisata kondisinya, jalan ke mana, perizinannya, siapa saja yang punya bus pariwisata, itu juga tidak mungkin Kementerian Perhubungan akan melakukan monitoring secara manual. Berapapun jumlah personil Kementerian Perhubungan Darat itu tidak akan mampu melakukan monitoring bus-bus pariwisata itu, bisanya harus dengan apa juga harus dengan teknologi.

Kemudian Odol itu juga begitu, bagaimana melakukan monitoring ya paling tidak meminimalisasi supaya berkurang ya. Ini kan belum ada kebijakan konkrit dari tapi tidak masalah untuk meminimalisasi itu perlu ada pengendali itu semua harus dilakukan dengan teknologi.

Kemudian situasi dermaga-dermaga penyeberangan itu juga harus diakomodir harus mengakomodir teknologi. Bagaimana memonitor ya dalam waktu cepat dalam kondisi pada saat itu juga bisa termonitor klik di kantor Perhubungan Darat sudah tahu situasi kondisi sehingga langsung bisa diatasi. Maka saran saya Perhubungan Darat maupun kereta api dalam hal pelayanan mungkin juga kepada BPSDM, manfaatkan itu teknologi karena teknologi kita sudah berkembang. Saya kira itu Pimpinan terima kasih.

Assalamu'alaikum.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Bapak-Ibu Anggota Komisi V perlu saya sampaikan disini juga hadir Kepala Balai, Kepala Balai Jalan, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan kepada Kepala Balai nanti saya persilakan. Selanjutnya saya persilakan Ibu Cen Sui Lan dan siap-siap Pak Irmawan. Silakan Bu.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V.
Yang saya hormati Pak Dirjen dan jajarannya dari Kementerian mitra
Komisi V.**

Saya ke Pak Dirjen Darat. Pak Dirjen tadi kan kita sudah bicara bahwa Provinsi Kepri itu kan lebih banyak lautnya daripada daratnya. Jadi pada kesempatan ini saya mohon agar Kabupaten-kabupaten di Kepri itu sangat memerlukan halte laut. Jadi saya harap di 2024 mungkin lebih diprioritaskan pembangunan halte laut untuk konektivitas masyarakat. Jadi bukan halte yang besar-besar halte yang kecil untuk masyarakat-masyarakat. Saat ini saya lihat masyarakat sangat susah untuk melanjutkan perjalanan. Jadi bagi kami itu kami tidak perlu yang besar-besar Pak Dirjen, yang kecil itu tapi diperbanyak itu yang sangat diperlukan. Mungkin itu saja yang dari yang saya minta untuk beberapa Kabupaten.

Ada yang khusus juga saya minta Pak Dirjen. Kemarin sudah saya sampaikan waktu Raker dengan Pak Menteri mengenai roro mini, tadi sempat saya sampaikan juga ke Pak Dirjen, itu untuk Kabupaten Lingga untuk anak-anak sekolah itu. Jadi di antara pulau itu namanya gugus Senayang, mereka saat ini sangat memerlukan transportasi laut yang kami sebut itu roro mini hanya untuk mengangkut manusia dan logistik saja, jadi tidak perlu yang besar tidak perlu untuk mobil. Kalau mengharapkan dari Pemerintah Daerah tentu sangat memberatkan Pak Dirjen dan itu juga untuk pekerjaan mereka sehari-hari untuk melaksanakan aktivitas dan juga untuk kegiatan-kegiatan anak sekolah. Jadi mungkin itu Pak Dirjen tolong diprioritaskan di 2024.

Terima kasih pimpinan, Terima kasih Pak Dirjen hanya itu Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya selanjutnya Pak Irmawan, silakan Pak. Siap-siap Ibu Hanna ya Ibu Hanna setelah Pak Irmawan.
Silakan Pak silakan.

F-PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan beserta Anggota Komisi V yang kami hormati,
Bapak Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Kereta Api dan kepala BPSDM,
Kepala BPTJ, beserta kepala Balai yang hadir pada kesempatan ini.**

Pertama sekali saya ingin ke Dirjen Darat dulu Pak. Kami ingin menyampaikan bahwa di Provinsi Aceh itu ada sekitar 2.000 Km jalan nasional. Kemudian dari 2.000 jalan Km jalan nasional ini hanya sebagai kecil yang hari ini mendapat fasilitas keselamatan, baik itu rambu-rambu maupun marka jalan. Kalau saya tidak salah jatah untuk marka jalan setiap tahunnya hanya dapat

200 Km di jalan raya Pak, sementara yang harus dipasang marka jalan itu lebih kurang sebanyak 2.000 Km. Jadi oleh karena itu kami berharap kepada Dirjen Perhubungan Darat agar di tahun 2023 ini bisa memaksimalkan anggaran untuk melengkapi fasilitas-fasilitas keselamatan jalan di jalan nasional Provinsi Aceh, termasuk rambu-rambu jalan juga Pak.

Kemudian selanjutnya di Aceh ada beberapa pelabuhan penyeberangan yang kondisinya sampai hari ini perlu penanganan dari apa dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat. Pertama penyeberangan pelabuhan Labuhan Haji yang mana ketika beberapa waktu yang lalu Pemerintah Aceh ada mengadakan kapal penyeberangan tapi sayangnya karena kondisi pelabuhan ini terjadi pendangkalan, sehingga tidak dapat merapat kapalnya ke dermaga ini. Jadi saya berharap kepada Bapak Dirjen Perhubungan Darat agar renovasi atau perbaikan daripada pelabuhan penyeberangan Labuhan Haji ini bisa menjadi prioritas untuk penanganannya di tahun 2024 ini.

Kemudian di samping itu juga ada daerah wisata yaitu di Kabupaten Aceh Singkil, ada Pulau Banyak Pak. Pulau Banyak ini hari ini telah kita kembangkan sebagai objek wisata sehingga hari ini sudah banyak pengunjung yang datang ke sana, tetapi kondisi pelabuhannya sangat tidak seimbang dengan pelabuhan penyeberangan yang ada di kota Singkilnya. Jadi ini juga perlu penanganan pembangunan beberapa fasilitas sehingga para wisatawan bisa merasa nyaman ketika berkunjung ke daerah Pulau Banyak ini. Kemudian pembangunan pelabuhan di Sepido Kabupaten Aceh Simelue ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sana. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan kepada Dirjen Perhubungan Darat.

Kemudian selanjutnya kepada Dirjen Perkeretaapian. Tadi kita di dalam sudah diskusi Pak karena ada dua sebenarnya di Aceh itu. Pertama yang selama ini kita gagas sambungan rel kereta api dari Binjai, Siliput sampai ke Kuala Simpang. Jadi kan sampai hari ini kan rel yang Bapak bangun itu masih mentok di Siliput kalau saya tidak salah, sehingga rel yang sudah menelan banyak anggaran ini sampai hari ini belum bisa difungsikan Pak karena masih mentok di situ. Jadi ini juga kita harap kepada Bapak Dirjen Kereta Api agar anggaran yang sudah kita alokasikan ini tidak mubazir, sehingga perlu kelanjutan daripada pembangunan ruas rel kereta api yang dari Siliput sampai ke Provinsi Aceh.

Disamping itu juga yang kami sampaikan di dalam tadi terkait dengan pembangunan rel kereta api yang Lhokseumawe-Bireun. Tadi Bapak mengatakan bahwa ini sudah menjadi prioritas tapi kami tidak melihat ada di dalam paparan Bapak ini atau barangkali tidak tertera di sini tapi yang penting kami berharap agar apa yang sudah di kita rencanakan ini agar dapat ditindaklanjuti dalam waktu dekat ini, sehingga anggaran yang selama ini sudah kita alokasikan tidak mubazir Pak. Jadikan kalau tidak dapat kita fungsikan rel yang sudah kita bangun saya pikirkan akan sia-sia anggaran yang sudah kita alokasikan ini. Jadi oleh karena itu kami berharap kepada Dirjen Kereta Api agar fokus dan konsentrasi untuk menyelesaikan rel kereta api yang ada di

Provinsi Aceh ini. Barangkali hanya ini yang dapat kami sampaikan Pak Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelumnya Pak saya ada mau nyerahin kepada Dirjen Darat ini Pak.

KETUA RAPAT:

Iya silakan Pak Irmawan langsung saja. Foto-foto sekretariat tolong foto, ini penting ini untuk Dapil ini harus difoto. Ini Pak Irwan ini Pak mau menyerahkan juga nih foto-foto sekretariat foto.

Ya selanjutnya saya persilakan ke Ibu Hanna silakan Bu, kemudian siap-siap nanti Ibu Irene.

F-PAN (HANNA GAYATRI, S.H.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Yang saya hormati Bapak Ketua dan beserta jajaran.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam untuk semuanya.

Yang saya hormati seluruh teman-teman saya yang terutama Bapak Wakil Ketua kita yang hadir,

Yang saya hormati Bapak Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Dirjen Perkeretaapian dan juga Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan beserta segenap jajaran keseluruhannya.

Saya dari materi yang dipaparkan ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Satu, capaian realisasi anggaran tahun 2023 per Juni 2023 sebesar 38 2,22% atau 2,18 triliun, menurut hemat kami sudah baik bila dibandingkan prognosa dan realisasi 2022 yang masing-masing hanya 34,12% dan 35,42%. Dalam program kegiatan Tahun Anggaran 2024 untuk Provinsi Sumatra Selatan disebutkan ada 5 UPS UPPKB atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor yang 4 unit sudah beroperasi dan 1 unit tidak beroperasi di Desa Simpang Nimbang di Sumatra Selatan II. Pada kesempatan ini saya sangat mengharapkan dan sarankan untuk UPPKB yang tidak beroperasi agar diprioritaskan pelaksanaannya mengingat pentingnya saran tersebut untuk mengendalikan kendaraan-kendaraan yang *overload* dan *over* dimensi untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas.

Kami sangat senang karena program penerangan jalan umum sudah berjalan dengan baik. Mengingat masih minimnya penerangan jalan umum di daerah-daerah pemilihan saya Sumatra Selatan II, saya minta terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir Kayu Agung untuk tahun 2024 ini agar ditambah

untuk kuotanya. Agar program-program PJU ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai penerangan jalan umum di malam hari, khususnya di desa-desa untuk menerangi setiap jalan desa untuk umum sehingga mempermudah aktivitas masyarakat dan dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas pengguna jalan.

Dan sangat diingatkan juga saya mengingatkan Bapak di Kabupaten Ogan Komering Ilir itu di Kayu Agung itu paling banyak terjadi perampokan. Saya tidak tahu yang merampok itu apakah OKI sendiri orang OKI sendiri atau dari daerah lain. Maka itu kalau terjadi hanya perampokan dan dalam suasana gelap tidak ada penerangan jalan, pembunuhan yang terjadi. Maka itu saya sangat mengharapkan untuk adanya lampu jalan. Terima kasih mudah-mudahan terkabul.

Billahi taufiq walhidayah.

Wasssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan Pak Ketua saya mau menyerahkan ini kepada Pak Djoko.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu silakan.

Iya Bu Hanna. Selanjutnya saya persilakan Ibu Irine.

F-PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos, MCOMN&MEDIAS):

Iya terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati, juga Anggota Komisi V dan Bapak Dirjen beserta jajaran yang saya hormati.

Saya ingin pertama-tama saya ingin menyoro *slide* paparan Bapak halaman 22 dan 23. Saya pikir ini merupakan program yang sangat bagus yaitu subsidi angkutan jalan perintis dan juga subsidi angkutan penyeberangan perintis. Tetapi yang saya pelajari Pak dari Dapil saya dan beberapa daerah lain saya pikir yang perlu dievaluasi adalah kelayakan armada untuk menunjang aspek keselamatan. Jadi evaluasi itu perlu dilakukan terhadap faktor perhitungan biaya subsidi, sehingga juga subsidi ini bisa terserap dengan baik, itu menjadi catatan bagi saya. Saya pikir tidak hanya Provinsi Maluku Utara tetapi banyak tempat di wilayah lain yang saya pikir terkendala dalam penyerapan subsidi ini, karena kaitannya dengan kelayakan armada. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua Pak ini suara dari Dapil. Saya mohon perhatiannya seperti Bapak pasti telah ketahui bahwa ada kecelakaan di pelabuhan Bastiong tempo lalu dan ini menyebabkan saat ini hanya ada satu dermaga yang bisa melayani. Antriannya panjang banget Pak ini sudah sangat tidak layak, karena Bastiong merupakan simpul utama penyeberangan yang ada di Ternate

bahkan bisa dikatakan di Maluku Utara. Jadi harapan saya Bapak boleh mendorong penyelesaian permasalahan perbaikan ini Pak kalau bisa sebelum liburan natal dan tahun baru. Karena kita tahu menjelang natal dan tahun baru itu juga selain banyak sekali pastinya orang yang akan bertransportasi tapi juga cuaca menjadi tantangan. Jadi saya mohon sekali untuk segera penyelesaian perbaikan untuk Dermaga Bastiong itu.

Lalu selanjutnya Pak ini di *slide* Bapak juga ini ada dukungan 10 kawasan strategis pariwisata nasional dan di situ disebut poin nomor 9 itu ada Morotai. *Nah*, ini tadi juga sempat saya saya sampaikan Pak bahwa di Morotai saat ini itu sudah ada tiga bus air, itu harganya kita tahu sangat mahal tetapi sangat disayangkan sampai saat ini belum ada pelabuhan bus air untuk tersebut, ini di Daruba pantai daerahnya. Kita tahu bahwa tentu fasilitas sandar bus itu menjadi *urgent* menjadi sangat sangat penting karena ini juga mobilisasi masyarakat Daruba menuju Sumsu yang menjadi titik dari pariwisata tersebut. Jadi saya pikir jika fasilitas sandar bus ini ada tentu bisa mendorong pariwisata di Pulau Morotai secara keseluruhan sebagai kawasan strategis nasional. Dan ini juga kita ketahui bahwa bicara tentang Morotai kita tidak hanya bicara tentang Dodola ataupun tentang Daruba tetapi kita juga ada pulau Rawu yang saya pikir juga membutuhkan dermaga, itu dermaga untuk penumpang sekaligus untuk bongkar muat, karena titiknya hanya ada di situ yang lainnya kena ombak. Jadi ini saya mohon juga bisa menjadi perhatian nasional untuk mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata nasional.

Nah, lalu Pak saya juga mohon perlu adanya terobosan kebijakan ini untuk dibuka ruang untuk operator swasta yang bisa menambah jumlah kapal yang melayani penyeberangan di provinsi Maluku Utara. Karena memang saat ini jumlahnya belum memadai untuk kebutuhan masyarakat yang sangat besar. Jadi lintas kapal itu menjadi kebutuhan transportasi utama kami Pak, karena masih banyak sekali daerah-daerah yang belum terhubung secara darat.

Lalu saya juga ini mengucapkan Pak pada kesempatan kali ini kepada Dirjen Perhubungan Darat, karena kalau di Maluku Utara tidak ada kereta api ini. Jadi khusus istimewa untuk Dirjen Perhubungan Darat terima kasih Pak karena tahun 2023 Maluku Utara cukup banyak mendapatkan program secara nasional, ada marka, ada juga penerang jalan dan selanjutnya. Walaupun kalau hanya boleh meminta ya tentu cakupannya belum memenuhi tapi nggak apa-apa kita paham ini secara bertahap yang penting Maluku Utara yang termasuk wilayah 3T juga berbatasan langsung dengan negara lain Pak ini bisa terus menjadi fokus atau mendapatkan perhatian lebih atau afirmasi lebih untuk program-program selanjutnya.

Dan saya sekedar mengingatkan Pak poin terakhir saya. Itu beberapa waktu yang lalu dalam RDP saya juga sudah membahas dengan bapak mengenai permohonan saya terhadap kendaraan uji keliling. Karena saat ini jumlahnya cuman satu Pak, sementara kita tahu Provinsi Maluku Utara itu 10 Kabupaten/Kota. Jadi kalau umpamanya cuman satu ini diputar waktunya kepanjangan Pak gitu. Jadi Ternate mau dapat lagi itu mungkin 8 bulan baru bisa sampai Ternate lagi. Sementara saya pikir ini menjadi sebuah keharusan

yang harus ada dalam pelayanan. Jadi ini saya mohon kalau boleh Pak kita ditambah tiga Armada Pak, sehingga kita bagi ke tiga zona untuk pelayanan kendaraan uji keliling itu.

Mungkin itu dari saya Pimpinan terima kasih atas waktunya.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya saya persilakan Ibu Sri Rahayu dan siap-siap nanti Ibu Novita. Silakan Bu Sri.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, Anggota Komisi V dan Pak Dirjen Darat, Pak Perkeretaapian, kemudian BPSDM dan BPTJ.

Yang pertama Pak untuk darat. Saya selalu menyampaikan bahwa semua ya mungkin yang pertama ini. Terkait dengan BTS tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Bapak-Ibu yang lain dari Komisi V. Saya ingin tahu sebenarnya untuk ini sampai sejauh mana akan selalu ada dan hasil evaluasinya seperti apa, kemudian secara teknis seperti apa uang itu disampaikan dalam rangka subsidi itu. Kira-kira ke depannya *plan*-nya ini apakah terus akan melaksanakan itu atau pada waktu tertentu pada situasi dan kondisi tertentu itu akan dicabut dan seterusnya. Saya mohon penjelasannya untuk untuk semua. Karena kita nggak tahu persis ini, yang diberi ini siapa meskipun ada subsidi. Karena kan seperti kereta api sekarang juga banyak kereta api-kereta api yang memang sudah dihuni atau yang naik itu orang-orang mampu.

Kemudian untuk Perkeretaapian dulu. Pak saya minta evaluasinya kereta api ini kan programnya banyak ya di tahun 2023 meskipun ini sudah ada realisasinya. Saya ingin tahu di mana di mananya sampai sejauh mana perkeretaapian khususnya progres dalam pembangunannya ataupun mungkin revitalisasinya atau apapun yang menggunakan anggaran di APBN ini. Tolong saya diberikan hasilnya seperti apa.

Kemudian yang selanjutnya masih perkeretaapian. Pada tahun 2023 target padat karya itu kan besaran biayanya 23 miliar di sini. Kemudian tenaga kerjanya targetnya 2024 di 9 balai, biayanya dari SBSN dan ini bagus. Realisasinya itu baru 56% uangnya tetapi tenaga kerjanya sudah mencapai 101%. Artinya kalau itu nanti ke depan itu selesai semua berarti realisasinya itu bisa mencapai 200%. Nah lalu gimana kemarin ketika menyusun dari sejumlah ini hingga menjadi 200 dari sudut kuantitas bagus tetapi seperti apa. Apakah honorinya tenaga kerja itu yang dikurangi atau seperti apa, sehingga realisasinya mampu mencapai sampai 200% ke depannya. Positif tetapi saya hanya ingin tanya seperti apa itu kok bisa sampai seperti itu.

Kemudian pertanyaan saya yang terakhir dari Pak Perkeretaapian. Semuanya ini kan juga apa memerlukan tambahan untuk revitalisasi ataupun untuk pembangunan apapun begitu. Dan harapannya sebenarnya pikiran kita semua baik itu darat, laut, udara, kemudian perkeretaapian, BPTJ dan semuanya, itu pikiran kita kan tidak hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran yang sudah diberikan. Tetapi kan kita berharap bahwa ke depan ini akan mampu justru memberikan PNBK kepada APBN kontribusinya akan semakin meningkat bahkan akan mampu untuk mengelola atau memenej semua pembiayaan yang ada, itu harapan kita. Lalu progresnya atau ke depan di tahun 2024 juga mungkin juga kita ingin tahu bagaimana grand disain untuk hal tersebut. Apakah hanya *as usual* kita melaksanakan tugas, ada anggaran, ada pembelanjaan dan seterusnya, apakah hanya seperti itu atau ada *plan-plan* lain yang Bapak lakukan.

Selanjutnya untuk transportasi darat, oh Bapaknya belum ada ya. Kemudian BPSDM dulu oh Bapaknya sudah datang.

Baik untuk transportasi darat saya juga selalu menyampaikan kaitannya dengan terminal tipe A. Kita tahu bahwa terminal tipe A rata-rata dibangun dari yang sudah ada dari Kabupaten atau Provinsi yang ada. Saya bukan tidak setuju, setuju, tetapi sampai sejauh mana sebenarnya ke depan juga karena ini kan harapannya dengan adanya tipe A ini kan memberikan fasilitas pada pelayanan kepada masyarakat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga akan menghasilkan untuk memberikan kontribusi kepada APBN dalam rangka juga untuk supaya APBN ini tidak selalu hanya dipakai untuk bagi-bagi program yang tidak pernah berpikir secara apa ya *entertain* ya istilahnya atau bisnis begitu. Karena apapun yang namanya Pemerintahan pasti mengharapkan juga hasil tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran, itu harapan kita.

Oleh karena itu saya hanya ingin tahu ke depannya terminal-terminal tipe A ini sampai sejauh mana akan selalu dibangun. Apakah ini berdasarkan hanya permintaan, karena daerah tidak mampu sehingga diserahkan atau memang punya *plan* desain besar bagi Perhubungan Darat untuk hal ini. Saya sekali lagi saya mendukung dengan adanya pelayanan baik kepada masyarakat, masyarakat akan semakin nyaman sehingga banyak menggunakan transportasi darat.

Kemudian untuk BPSDM Pak. Dari Bapak ini kan dalam mempersiapkan sumber daya manusia ini kan punya banyak sekolahan juga, punya perguruan tingginya banyak. Sebagian besar ini juga menggunakan anggaran dari Pemerintah atau APBN. Karena banyak yang semacam apa beasiswa ya Pak ya sebagian besar. Meskipun ada yang harus membayar untuk asrama dan seterusnya itu memang ada tetapi ini kan juga BLU (Badan Layanan Umum). Namun demikian ini juga juga banyak atau anggaran besar yang mesti digelontorkan ke sekolah-sekolah ini. Pernahkah Bapak atau sudahkah dilakukan semacam evaluasi terhadap perguruan tinggi-perguruan tinggi yang Bapak kelola ini, karena banyak jumlahnya ini ada 25 perguruan tinggi ini luar biasa. Mana yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian karena kebutuhan

untuk dipertimbangkan, untuk dikembangkan, bahkan mungkin tidak hanya dalam negeri kebutuhannya tetapi juga ke luar negeri. Pernahkah ada melakukan evaluasi itu dan mana kira-kira yang ini tidak perlu. Karena tidak perlu kita harus mengelola sekolah ini hanya sekedar karena ini masih banyak tenaga kerja, dosen-dosenya juga masih banyak untuk hal tersebut, sehingga ini dipertahankan hidup matinya nggak perlu kita pikirkan. Tolong itu saya diberikan ininya.

Kemudian yang terakhir untuk BPTJ. Tadi sudah ditanyakan juga kepada teman-teman untuk kaitannya BTS tadi. Apakah memang masih membutuhkan hal tersebut untuk BTS itu sampai sejauh mana BTS ini masih diperlukan dalam rangka untuk memberikan subsidi kepada warga masyarakat. Karena kalau kita hitung kalau kita hitung memang anggaran apa tiket itu ada yang 3.000 ada yang begitu ya, itu kalau dibuat di kurs-kan gitu mungkin hanya sekian sen gitu dari apa US. Saya bukan berarti membandingkan tetapi apakah memang ini tidak perlu dievaluasi atau mungkin ada sesuatu yang bahkan ditambah atau dikurangi atau tetap berjalan atau dihentikan, adakah evaluasi semacam itu untuk hal ini. Saya kira itu saja terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya saya persilakan Ibu Novita dan siap-siap Pak Aras.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Pak saya akan menyerahkan ini dulu Pak.

KETUA RAPAT:

Oh iya silakan Bu Sri. Iya saya silakan Ibu Novita nanti selanjutnya siap-siap Pak Aras.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Makasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota.

Yang saya hormati Pak Dirjen Darat, Kereta Api, kemudian BPSDM, BPTJ dan jajaran semuanya, serta Kabalai yang hadir disini.

Yang pertama saya dengan Pak Dirjen Darat dulu Pak Hendro. Ini mengenai BTS Pak yang di Banyumas, sempat kemarin waktu sama Pak Menteri saya sampaikan tentang PR BTS yang ada di Trans Banyumas. Kemarin saya pulang Dapil saya bertemu dengan apa beberapa operator di sana, di sana ternyata permasalahan yang pertama kemarin adanya

penunggakan bayaran tetapi sudah selesai, terima kasih. Tapi ada permasalahan yang berikutnya yaitu katanya ada keputusan sepihak tentang apa penurunan gaji karyawan di sana. Gaji supir dan apa perangkatnya atau gimana *gitu*, tetapi in keputusannya sepihak. Yang ingin saya tanyakan apakah seperti itu MoU-nya, karena ini MoU-nya kan katanya tidak seperti itu. Harapan mereka tidak ada penurunan dari gaji-gaji para supir. Karena kalau kita lihat mungkin sedikit tetapi untuk mereka itu sangat penting Pak Dirjen. Kemudian angkanya sekitar 4 juta menjadi 3,6 juta sekian tapi itu mempengaruhi mereka, mereka berharap ini bisa dievaluasi kembali tidak ada penurunan sepihak.

Kemudian yang saya ingin tanyakan tentang tarif BTS. Apakah tarif itu keputusan dari pusat atau bisa dilaksanakan oleh operator disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Karena 10 BTS yang ada ini pasti situasinya berbeda-beda. Kalau di Banyumas ini BTS-nya bagus, masyarakatnya menggunakan sangat tertarik, sehingga ini perlu penanganan khusus di Banyumas.

Mengenai lampu *guardrail* dan rambu-rambu ya nanti mungkin tadi sudah dibahas, harapannya segera direalisasikan. Khususnya ya mungkin untuk Dapil semuanya tapi khususnya Dapil saya siapa tahu lupa Banyumas Cilacap Pak Hendro dan Dapilnya Pak Hendro juga pastinya. Jadi jangan ditinggal yang lain tadi sudah terima kasih terima kasih kok saya mau terima kasih bingung, karena justru Dapil kita belum ada yang turun begitu.

Berikutnya tentang terminal, tentang subsidi, kalau ada kegiatan-kegiatan berharap sekali kita diinformasikan begitu. Jadi pada saat ada seremonial khususnya ini saya nggak mau cerita di Dapil teman-teman. Dapil saya Banyumas Cilacap berkabarlah kalau ada acara-acara khususnya di Banyumas Cilacap tentang kegiatan apapun di sana yang berkaitan dengan Dirjen Darat. Karena ya penting sih apalagi tentang subsidi umpamanya, itu tadi yang siap itu Pak Dirjen apa Pak Jadi ya.

Kemudian tentang sosialisasi kemananan atau ada program dengan Ojol, dengan apa bus dan semuanya lah perangkat yang ada di bawahnya Dirjen Darat berharap sekali. Apalagi tahun ini kalau tahun-tahun kemarin mungkin nggak apa-apa saya sering banget lihat ada kegiatan saya baru di foto ada kegiatan ini oh saya nggak ngerti gitu Pak Dirjen. Tahun ini saya minta ada koordinasi yang lebih baik di Dapil saya.

Berikutnya padat karya juga tadi saya lihat ada beberapa padat karya, begitu juga di Dapil saya saya berharap padat karya apapun kita bersinergi di Dapil khususnya Banyumas Cilacap. Tentang Odol itu PR-nya Pak Dirjen semoga segera bisa ada solusi yang terbaik.

Kemudian kereta api. Pak kalau kereta api sih tadi saya ada beberapa kegiatan di sana, ya tetap harapannya nanti kalau ada kegiatan bisa koordinasi seperti biasa. Karena dari dulu kalau ada padat karya kita selalu bersama-sama, ya tahun ini kelihatnnya belum ada kegiatan yang di lapangan, nanti bisa sinergi Pak Dirjen terima kasih. PR-nya lagi kalau kereta api itu ya palang pintu

Pak, karena masih banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di mana-mana mengenai palang pintu. Palang pintunya ini apakah dari dulu itu keputusan pengadaannya di Pusat atau Provinsi atau Kabupaten saya minta tolong sekali ini bisa dikoordinasikan. Ya jangan bosan-bosan karena ini mengenai keselamatan nyawa masyarakat. Kemudian kalau ada palang pintu apakah ini jalurnya mesti ditutup atau dibuatkan atau gimana dan palang pintunya juga dibuat yang secara psikologi itu masyarakat tidak ingin nerobos itu gimana itu PR-nya.

Berikutnya tentang tadi Stasiun Gambir juga dulu saya pernah nanya sama gitu, kalau bisa sih yang ada itu justru dimaksimalkan.

Berikutnya terakhir adalah kereta api cepat. Dulu saya tanya juga tentang kereta api cepat mungkin belum ada jawaban yang maksimal ini. Tentang kereta api cepat ini progresnya bagaimana, kemudian dengan beban biaya yang begitu tinggi dan PR-PR yang banyak itu targetnya bisa mengembalikan modal atau bagaimana, saya minta tolong bisa diceritakan di jawaban Pak Dirjen.

Itu Pak untuk BPSDM ya mungkin bisa kita bersinergi kalau memang ada bukaan-bukaan sekolah atau bukaan ini kita bisa dari lokal-lokal bisa ikut mendaftarkan apalagi beasiswa. Kalau BPTJ tadi tentang BTS ya Pak ya karena saya lihat juga tadi ada persentase tentang BTS, karena PR saya BTS di Banyumas. Demikian Pimpinan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Ibu Novi.

Jadi Pak Dirjen yang disampaikan oleh Bu Novita ini itu sebenarnya aspirasi kita semua. Jadi jika ada program atau kegiatan di Dapil tolonglah, ini kan Kepala Balai ada hadir di sini. Jadi tolonglah para Kepala Balai sampaikan ke kita, kita ingin hadir disana, artinya kita kan bermitra jadi kita juga tahu kira-kira program dari Kementerian Perhubungan tuh apa saja di Dapil kita, kira-kira itu ya Pak Dirjen ya.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Pimpinan tambah sedikit lagi.

Jadi pada saat mau ada kegiatan kalau bisa koordinasi tanggalnya supaya kita cocok-cocokan tanggal. Karena jangan sampai ini sudah dipastikan ini lagi itu mendadak gitu. Makasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Dirjen ya tolong sampaikan kepada Kepala Balai yang hadir disini. Saya lihat hadir semua ini di bawah di atas juga ada Kepala Balai. Iya selanjutnya saya persilakan Pak Aras dan kemudian siap-siap Pak Hamka.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

**Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen Darat, Dirjen Kereta A, BPSDM dan BPTJ
dan seluruh Kepala Balai yang hadir pada kesempatan ini yang saya
hormati dan saya banggakan.**

Pertama-tama tentu saya mengapresiasi Pak Dirjen beserta jajarannya atas kerjasama dan komunikasi yang terjalin kurang lebih 4 tahun dan tentu ini tahun terakhir untuk periode ini. Mudah-mudahan teman-teman dari anggota Komisi V tetap bisa melanjutkan kerja sama lagi di 2024 dan 2029 *insya Allah*.

Yang kedua terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 tentu secara garis besar bahwa hampir semua program aspirasi belum terselesaikan dengan baik di Dapil. Mohon ini dipercepat sehingga akses kita untuk Padat Karya dan untuk kepentingan masyarakat betul-betul bisa terjembatani dengan kehadiran Kementerian Perhubungan yang tentu menyasar ke seluruh pelosok tanah air.

Yang kedua adalah terkait program untuk program 2024 ya. Ini untuk Sulawesi Selatan tentu kami sangat prihatin melihat terminal A Makassar yang sudah cukup lama tidak maksimal fungsinya. Mohon ini atensi dari Kementerian sehingga ini bisa dimaksimalkan. Apakah mau dikembangkan di tempat yang ada sekarang atau dipindahkan, seperti apa kelanjutannya mohon penjelasan.

Dan terkait yang kedua adalah faskes keselamatan jalan di Sulawesi Selatan baik Poros dari Makassar sampai Parepare tembus ke Sulawesi Barat, maupun dari Maros ke Kabupaten Bone yang mengarah ke Sulawesi Tenggara, ini sedang banyak pengerjaan jalan pelebaran dan sebagainya. Dan baru saja kami melakukan kunjungan ke sana dan fasilitas jalan sangat terbatas. Mohon penganggaran di tahun 2024 ini lebih maksimal sehingga kejadian-kejadian yang ada pada hari ini hampir setiap saat terjadi kecelakaan. Misalnya karena lampu jalan yang tidak memadai, kemudian rambu-rambu lalu lintas yang tidak lengkap, ini menjadi penyebab utama sering terjadi kecelakaan di daerah itu, apalagi di Kapang, Tamba dan sekitarnya ini jalan berkelok-kelok yang sangat berpotensi setiap saat terjadi kemacetan total. Nah masalahnya lampu jalan dan lampu-lampu Jalan sangat terbatas, sehingga di

sana tentu menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk memudahkan seluruh aktivitas dalam perjalanan.

Di Sulawesi Selatan sendiri saya melihat di program 2024 ada ruas Kabupaten Barru batas Pangkajene, kemudian Parepare Kota Barru, lalu kemudian Pangkep dan Kota Maros dan Maros sampai Kabupaten Bone. Mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan anggarannya, sehingga di daerah-daerah yang rawan terjadi kecelakaan di sana betul-betul bisa dikurangi potensinya, sehingga semua bebas untuk melakukan perjalanan dengan tanpa hambatan yang cukup berarti.

Kemudian yang selanjutnya jembatan timbang ini ada saya lihat beberapa jembatan timbang yang beroperasi di antaranya Maros, Maros ini keluhannya Bupati Maros beserta dengan jajarannya adalah ini kalau betul-betul difungsikan biasanya macet total Pak Dirjen. Karena di sana ya hampir sebagian besar kendaraan yang lewat itu sudah melewati tonase dan dimensi, dalam artian ODOL sangat banyak yang melanggar sehingga ini perlu perhatian. Apakah potensinya untuk dipindahkan atau sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah ada jembatan timbang di bulu dua ini tidak beroperasi. *Nah*, sementara jalan ini juga sangat rawan terkait dengan pelanggaran ODOL ini mohon perhatian.

Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kereta api. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen untuk jalur Makassar-Parepare. Ini perhatian tadi sudah disampaikan bahwa *insya Allah* yang akan dilaksanakan untuk 2024 hanya dari Barru ke Parepare, lalu Makassar belum. Mohon disampaikan alasan rilis di publik sehingga kami tidak disalahkan dan Kementerian Perhubungan disalahkan terkait dengan alasan sehingga Makassar belum dilanjutkan sampai saat ini. Kemudian selanjutnya tentu kami bermohon agar pelaksanaan anggaran tahun 2023 cepat dituntaskan sehingga tentu ini menjadi perhatian bagi kami, agar tentu kemanfaatan kereta api yang dari Maros sampai ke Garongkong betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat.

Dan yang terakhir adalah tentu dengan kehadiran seluruh Kepala Balai di semua daerah kami mohon sinergitas, komunikasi yang kondusif yang tentu demi kepentingan dan kelancaran seluruh program-program baik itu padat karya maupun program-program strategis yang ada di semua daerah. Karena sesungguhnya kami hadir di setiap daerah tentu juga mau mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan teman-teman Kepala Balai di daerah, sehingga kami juga bisa melakukan penilain terkait dengan kinerja dan seberapa besar anggaran yang masuk dan apa masalah-masalah yang muncul. Dan yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana usulan-usulan masyarakat apakah sudah diselesaikan atau tidak.

Lalu kemudian ini keluhan juga di beberapa daerah beberapa jalan daerah terutama yang dilintasi oleh kereta api ini banyak yang jalannya rusak akibat dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar dari proyek kereta api. Mereka menagih kapan ini bisa dibantu untuk perbaikan fasilitas jalannya, sehingga ini bisa kembali seperti sediakala. Lalu ada beberapa jalan yang melintas di bawah

proyek kereta api ini, ini banyak yang terbengkalai. Ada yang menjadi kolam ikan dan ada beberapa yang memang tidak layak untuk dilewati. Mohon ini diperbaiki agar tentu fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Barangkali begitu Pak Ketua, terima kasih atas perhatiannya semua terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamittoriq
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Aras.

Selanjutnya saya persilakan Pak Hamka, kemudian siap-siap Pak Sudjadi.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

*Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, Pak Dirjen dan seluruh jajarannya ada dua Dirjen yang hadir dan kepala Badan yang sempat hadir pada kesempatan ini.

Hanya ada beberapa poin. Yang pertama saya ingin meng-*fill* dulu dan mengharapkan kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini, bahwa hari ini kita melaksanakan tugas konstitusional kita masing-masing. Artinya apa Bapak punya kewenangan, DPR pun juga punya kewenangan. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa seluruh aparat mulai dari Kepala Balai sampai Menteri harus kita sepaham. Karena kalau salah satu yang tidak sepaham program ini pasti tidak bisa berjalan, itu namanya saling menghargai antar mitra. Apa yang ingin lebih jauh saya jelaskan di sini bahwa seluruh aparat mulai dari Kepala Balai jangan sampai biar dihubungi juga tidak bisa, yang seyogyanya harus melaporkan seluruh kegiatan-kegiatan di daerah kepada kami mana kami manakala kami ada di sana. Ini malah Kepala Balai ini menjauh nggak pernah memberikan informasi sedikit pun.

Saya minta berdiri Kepala Balai Kereta Api siapa, makasih. Namanya siapa Pak saya nggak kenal, saya tidak kenal Bapak dan Bapak tidak pernah menghubungi saya. Ada alasan apa nggak menghubungi, emangnya Bapak ini lebih tinggi lebih mudah saya hubungi Menteri daripada Bapak. Selama Bapak duduk di sana pernah nggak hubungi saya? tidak kan. Memang kami dianggap apa? ayo jangan begitu saudara.

Kami ini dipilih, kami juga punya hak anda harus melaporkan kepada kami bukan kami yang meminta, apa kegiatan saudara di sana. Tahu nggak undang-undangnya, tahu nggak hak dan kewajiban kita masing-masing, saya tidak pernah mengganggu Bapak.

Ini saya kira Pak Dirjen perlu dievaluasi. Jangan sok mau dihargai padahal anda juga tidak bisa hargai kami. Saya ungkap di sini kenapa peresmian kereta api tidak ada satupun Anggota DPR hadir, padahal Jokowi Presiden hadir. Siapa yang punya tanggung jawab? Kami sudah berdarah-darah memperjuangkan sudah dua periode di sini Bapak, kami harus menjelaskan kepada masyarakat. Kalau Bapak barusan saya dapat Pak, Kepala Balai yang baru tidak pernah menghubungi Anggota DPR, apalagi saya.

Mohon maaf Pak saya benar-benar agak kesal sedikit. Saya berikan waktu dan kalau tidak saya akan melapor sama Pak Menteri, saya akan telpon Pak Menteri. Tidak ada saya tahu mengenai Perkeretaapian di Sulawesi Selatan, saudara kerja apa, habiskan anggaran, jangan menganggap bahwa kami ini mau mengganggu Bapak mau cawe-cawe dengan Bapak, silakan itu urusan anda. Kami tidak dihargai, kami tidak pernah minta, pernah nggak saya minta proyek kepada Bapak? pernah nggak? Bapak sudah berapa bulan, berapa lama di Makassar belum pernah hubungi saya, ini Pak Dirjen menjadi catatan.

Bapak menganggap barangkali menganggap kita mungkin Bapak menganggap bukan saya Pimpinan. Di DPR ini hak, kewajiban Pimpinan dan Anggota sama, beliau kita hargai memoderatori pertemuan ini. Ini saya benar-benar tidak bisa tidak bisa maafkan itu langkah Bapak itu terlalu sombong, jabatan itu Pak sementara. Pernah satu kali saya minta waktu ketemu juga di hotel anda tidak mau ketemu dengan saya, diam saya bicara. Mohon maaf ya saya sudah tahu anda. Jadi gini Pak Dirjen saya minta tolong menjadi evaluasi, itu yang pertama pada seluruhnya.

Selanjutnya saya masuk pada materi. Pak Dirjen semua kegiatan-kegiatan khususnya Pak Dirjen Darat. Ini adalah pembicaraan pendahuluan kita, ini sudah bagus nanti akan kita detailkan nanti pada saat yang akan datang, ini baru pendahuluan. Yang menjadi catatan di sini adalah Pak Dirjen Darat, tolong dievaluasi mengenai pelaksanaan BTS dengan baik. Yang lalu subsidi diberikan 500 miliar, sekarang ini 500 lagi tahun 2024. Kalau sudah ditambah tiap tahun 500 miliar itu berapa triliun nanti jadinya, sampai kapan? Ada beberapa kelemahan yang saya lihat Pak Dirjen.

Pertama, konsepnya *smart city smart transportation*, semua berbasis android. Orang mau naik BTS itu Pak mau bayar tunai tidak bisa, karena belum biasa menggunakan aplikasi, ini menjadi catatan dan temuan saya. Oleh karena itu nanti kita bisa bahas detailnya Pak Dirjen, silakan lanjutkan dengan batas-batas waktu tertentu, sehingga subsidi kita itu bisa kita ukur dengan baik. Ada rute yang memang oke tapi ada rute juga yang sama sekali memang kosong. Saya telusuri Pak persoalannya tidak ada orang mau naik BTS itu karena dia mau bayar tunai Pak kebisaan bayar tunai nggak biasa dia pakai

aplikasi. Coba kita pikirkan Pak tetapi konsep *smart city* dan *smart transportation* memang sudah oke seperti itu tetapi kita harus pelan-pelan Pak, daerah ini Pak bukan Jakarta. Jakarta saja barangkali belum bisa secara penuh apalagi daerah, itu yang saya lihat yang menjadi kelemahan yang harus kita evaluasi. Kebutuhan kendaraan umum sangat dibutuhkan setiap kota seperti Kota Makassar, itu pasti.

Selanjutnya mengenai program-program tahun 2024 Pak Dirjen, seperti lampu jalan, marka jalan, nanti tahun 2024 ini sebaiknya lebih awal dikerjakan. Karena ini jujur saya sampaikan ini tahun politik Pak, sebab kami pidato di muka rakyat itu bahwa ada kereta api, ada marka jalan, ada ini ada ini ada ini, itu hasil perjuangan, itu hasil pembahasan Komisi V. Apa yang kami jual Pak untuk memberikan kepada kita nilai untuk terpilih kembali kalau bukan informasi dari Bapak-bapak, itu yang kami butuh, yang lain-lain tidak usah.

Itu kira-kira Pak Dirjen nanti kita dalam lagi dan saya terima kasih untuk Pak Dirjen Darat karena proyek di Kepulauan Selayar itu tiga proyek besar *alhamdulillah* sudah jalan semuanya, ya mudah-mudahan ada waktunya Pak Dirjen sama-sama kita ke pulau. Ada pembangunan dermaga tiga buah di sana Pak yang berbatasan dengan Flores. Anggarannya tidak main-main terima kasih, itu 275 miliar itu luar biasa. Selalu saya sampaikan kepada masyarakat, itulah nilai jual kami Pak. Jangan sama nanti nasibnya jalan Inpres, Pak Jokowi jalan saya bicara jalan Jokowi ke Lampung yang masa yang menjadi apa namanya tujuan kunjungan kerjanya Presiden akhirnya ke DPR, mana DPR jalannya untuk membuktikan bisa membantu jalan, itu loh pak.

Saya kira untuk darat saya kira cukup, untuk Perkeretaapian tolong dilanjutkan semua yang tertunda Pak. Kita paham kita mengalami guncangan sedikit beberapa waktu yang lalu, badai pasti berlalu dan harus kita memulai dengan itikad yang baik supaya kereta api ini bisa berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung itu sudah harus kita selesaikan. Dan saya senang kepada Pemerintah ingin mengkaji bagaimana kelanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sampai Surabaya. Dan saya sampaikan kepada wartawan pendapat saya bahwa itu lah yang benar. Kalau Kereta Cepat Jakarta-Bandung-Surabaya itu yang tepat, produktivitas dan efektivitasnya sehingga IRR dari pada proyek itu bisa kembali dengan cepat, itu yang tepat menurut saya. Ini tolong dilanjutkan semua kegiatan kereta api jangan tertunda karena masalah yang kita hadapi semua pasti bisa selesai, bermasalah kita selesaikan masalahnya yang penting tujuan akhir kita bahwa kereta api menjadi tumpuan utama kendaraan untuk masyarakat.

Yang terakhir kepada BPSDM. Saya ingin mengetahui padat karya apa Bapak lakukan, karena di situ saya lihat ada padat karya. Tolong nanti dijelaskan karena setahu saya tidak pernah kami dilibatkan dalam kegiatan padat karya di BPSDM.

Saya kira itu saja Pimpinan. Catatan yang paling terakhir mohon dengan sangat semua kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat yang langsung

dinikmati oleh masyarakat tolong didahulukan untuk dilaksanakan atau ditender sebelum 14 Februari 2024.

Demikian Pimpinan terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Ini Pak Dirjen ini sudah dua anggota Pak yang komplain tentang bagaimana komunikasinya dengan Balai di Dapilnya itu kurang maksimal. Tentu saya kira bagi Kepala Balai yang hadir di sini kita saling menghargailah, kita kan bermitra Pak Dirjen. Pembahasan anggaran ini kan tidak

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Menguatkan apa yang dibicarakan barusan memang seperti suasana di Kementerian Perhubungan berbeda dengan Kementerian lain yang menjadi mitra Komisi V. Kita sering rapat Pak, kita juga sering berkomunikasi dengan Balai-balai di bawah Kementerian PU ataupun lembaga terkait, namun saya memang merasakan seperti ada jarak. Padahal secara konstitusi kita Pak yang melakukan penganggaran di sini. Fungsi keduanya adalah kita melakukan pengawasan disamping undang-undang. Nah tentu ini menjadi catatan penting Pak untuk kita semua mengevaluasi kerja-kerja kita. Jangan kemudian betul apa yang disampaikan oleh Pak Hamka kemudian menjadi raja-raja kecil di daerah, di mana kita juga tidak perlu tahu bahkan tidak boleh tahu apa kegiatan mereka. Ini saya kira Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu sudah tiga itu Pak sudah tiga mungkin nambah lagi. *Nah*, artinya begini Pak Dirjen, Bapak Kepala Balai yang hadir, ini kan Bapak-bapak hadir disini dalam rangka pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran itu kan tidak bisa Bapak bahas sendiri, bersama DPR, kita sahkan baru anggaran itu bisa terealisasikan. *Nah*, oleh karena itu kami minta pemahaman pengertian sebagai mitra kita berkoordinasilah kira-kira program apa yang telah dilaksanakan, yang telah dijalankan di Dapil kita masing-masing, jadi kita tahu itu dari sisi anggaran. Dari sisi pengawasan setelah kita tahu kita melakukan pengawasan, kira-kira sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan

tidak implementasinya. Itu lah tugas kita di DPR Pak ada tiga Pak, pengawasan, penganggaran dan legislasi. Jadi apa yang disampaikan teman-teman ini bukan asal ngomong saja, dalam rangka yang pertama pengawasan tadi. Bagaimana kita melakukan pengawasan kalau kita tidak tahu Pak program-program di Dapil kita apa saja. Kemudian nanti kalau diberitahu satu hari sebelum hari H ada kegiatan kan nggak bisa begitu juga, minimal seminggu, lima hari sebelum hari H. Kira-kira kegiatan apa jadi kita bisa mengatur waktu, karena kesibukan kita mungkin sama.

Jadi saya harapkan Pak Dirjen, Bapak Kepala Balai yang hadir ini baik Kepala Balai dari apa Perhubungan Darat maupun dari Perkeretaapian, tolonglah bisa koordinasi kerjasama dengan kita anggota Komisi V. Kita hanya ingin mengetahui kira-kira program apa saja yang ada di Dapil kita. Jangan sampai nanti masyarakat yang ngomong ke kita. Oh Pak di tempat Bapak kemarin ada kegiatan ini kita tidak tahu kan aneh Pak, seharusnya kita menyampaikan kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu ya Pak Dirjen ya.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E):

Pimpinan sedikit interupsi.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Fauzi silakan.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Tolong-tolong ini sudah lama urut jangan

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E):

Nggak sebentar aja interupsi ini.

KETUA RAPAT:

Interupsi Pak interupsi Pak dua menit, satu menit aja.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Itu memang hak tapi ini tadi Bapak kan membatasi ini ini ini lainnya ngocehnya panjang sekali saya nggak ada waktu, kapan ngomongnya?

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E):

dua menit dua menit.

KETUA RAPAT:

Satu menit ya, Pak Sudjadi satu menit ya Pak senior satu menit.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E):

Saya usulkan apa yang disampaikan Pak Ketua untuk dimasukkan dalam kesimpulan rapat pada pagi hari ini.

KETUA RAPAT:

Iya, itu saja Pak Sudjadi. Silakan Pak Sudjadi, silakan Pak Sudjadi.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya memotong agak keras tadi saya menghargai kedudukan Pimpinan yang setiap saat mengingatkan kita ini jam ini tapi molor, mohon maaf kok didiamkan saja tapi saya rasa saya jadi senang walaupun umur saya tua. Setelah mendengarkan uraiannya Pak Hamka aku tinggal menggarisbawahi oke banget. Yang kedua saya kepada Pak Dirjen Kereta Api dan kepada semuanya. Kita itu kedudukannya sama Mas, hanya kemudian kita Legislatif Bapak Eksekutif. Tapi ada tiga yang tidak boleh sama sekali kita lakukan baik itu wakil rakyat baik itu wakilnya eksekutif. Satu, jangan melanggar hukum. Dua, jangan korupsi. Tiga, jangan main-main dengan agama. *Wis toh* kalau tiga itu *sampean* lakukan selamat nggak ada yang disekolahkan.

Lalu saya hanya usul Pak kepada Pak Dirjen, aku pengen kenal Direktur Pembangunan itu yang mana?

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Siap mohon maaf Bapak beliau sedang haji belum pulang, sedang haji Pak.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Direktur Perencanaan?

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Direktur Prasarana Pak.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Nggak, yang Direktur Perencanaan?

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Bagian Perencanaan Pak Kabag Perencanaan Pak Dandi silakan berdiri.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Itu dibawah apa, dibawah Dirjen atau Sekjen?

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Dibawah Setdirjen.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Kelemahannya *sampean karo* Direktur itu kerjasamanya selalu berebut. Mau tahu berapa alokasi di tempat saya itu nggak pernah ada realisasi, sudah diresmikan Pak Menteri saja nol. *Nah*, tolong Pak Dirjen ini perencanaan selama ini Pak ini dibawah Pak Sekjen toh, jangan terulang lagi lah jangan terulang lagi. Lalu saya mohon sisa yang terakhir yang nanti menjadi hal yang sangat bagus sekali reaktivasi Purwokerto-Purworejo jangan main-main jangan sulapan. Saya minta Direktur yang menangani entah itu perencanaan yang dari Kesekjenan Direktur itu harus kompak. Mohon maaf saya survei itu keliling kemana-mana Pak ngikuti tapi hasilnya *ndol*, alasannya uangnya tidak disiapkan oleh perencanaan sebagainya.

Nah, jadi tolong ini saya anggap sudah selesai tapi tolong Bapak Dirjen yang baru tunjukkan merahmu kebaikan. Saya ini sudah saya kalau dengan Pak Dirjen Darat terima kasih Pak Terminal tipe A nanti bisa saya untuk kampanye. Saya terpilih kembali Bapak mungkin bisa jadi Dirjen.

Satu pertanyaan saya saya minta yang ditangani Pak Cucu lampunya berapa, karena lampu ada dua, yang dikasihkan Balai yang ditangani Pak Cucu bagaimana mendistribusinya. Karena juga saya dipersulit mau minta bus saya ganti itu alasannya ini tadi pagi saya telpon, loh kok cara Birokrasi kok cara jawabnya begitu Pak. Saya termasuk sekarang ketularan Pak Hamka tadi. *Nah*, itu berapa yang jadi jatah Pak Cucu lampu di pusat, dibagi kepada siapa. Kalau Balai Daerah oke jelas, itu aja Pak Bapak semoga sukses.

Terus kemudian kepada badan apa itu Pak Kepala BP *anu* saya tolonglah Pak, Semarang itu berkali-kali ganti Direktur minta dibangun gedung baru itu nggak ada realisasi. Alasannya Direktornya tidak mampu, ini ini ini kasian Pak. Saya memperjuangkan ini walaupun bukan Dapil saya itu sejak 2015 sampai 2016 ini tugasnya beliau. Cuman saya tolonglah alasannya tanah, alasannya ini alasannya Direktornya nggak berani menghadap, nah itu Pak.

Terus sudah toh sudahlah ini saja Pak. Selamat kepada Pak Dirjen semuanya, teman-teman semua, jangan kecil hati jangan kecil hati hari esok akan lebih baik dari hari sekarang. Yang penting satu jangan korupsi, jangan

melanggar hukum, jangan main-main dengan agama, selamat *insya Allah* kasih.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih senior kita Pak Sudjadi. Jadi itu tadi saran-saran beliau ini jangan cawe-cawe Pak ya artinya itu ya, korupsi, jangan main dengan agama, satu lagi apa tadi? Iya selanjutnya saya persilakan Pak Irwan, kemudian siap-siap Pak Ruslan M Daud. Silakan Pak.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V beserta rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan.

Yang saya hormati Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDM, serta Kepala BPTJ, para Direktur, serta seluruh Kepala Balai yang hadir pada hari ini terkhusus mitra saya Kepala Balai Besar Pengelola Transportasi Darat Kaltim Bapak Dr. Muiz beserta mitra lama saya Bang Afi yang sekarang di pusat ya di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Saya menyampaikan apresiasi ya walaupun tentu ada beberapa tadi terkait hubungan kemitraan tapi tentu tidak bisa digeneralisir. Kami mengapresiasi hubungan yang baik dengan mitra kami dalam terkait pengelola transportasi darat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada saat itu. Dan kami menyampaikan terima kasih karena Kaltim menjadi Balai besar Pak Dirjen, tentu ini suatu lompatan yang baik apalagi dengan adanya IKN. Dan kami berharap hubungan ini terus terjalin saya pikir komunikasi yang baik akan bermuara pada kerja-kerja yang baik pula. Kemudian kami juga pada kesempatan ini mengapresiasi ya terkaitkan capaian realisasi sampai dengan Juni ini ada peningkatan dari realisasi pada Juni 2022 lalu, termasuk juga lebih tinggi daripada prognosa 2023 yaitu realisasinya 38,22%. Ini bukan hal yang kecil tetapi ini yang harus kita apresiasi ini karena ini kerja-kerja besar kawan-kawan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Kemudian saya membahas terkait permasalahan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan terutama di jalan nasional. Menurut saya ini harus menjadi fokus program Dirjen Perhubungan Darat karena memang kecelakaan kita di jalan nasional itu masih tinggi dan salah satunya adalah belum optimalnya pemasangan perlengkapan dan keselamatan jalan ini. Dan di sini di Kaltim khususnya di Dapil kami 21 ruas ini kami minta masih saya pikir masih kurang ya. Apalagi jalan nasional di Kaltim itu satu poros belum ada poros-poros lain. Jadi kalau kemudian ada kecelakaan cukup mengganggu ya alur transportasi dan kami lihat butuh dukungan fasilitas perlengkapan jalan yang lebih lagi terkait di Kaltim ini. Kalau perlu harusnya ini selesaikan dulu ini

permasalahan perlengkapan jalan nasional ini baru kemudian ada bantuan-bantuan teknis ini. Karena kan tugas utama kita kan menyelesaikan permasalahan keselamatan jalan nasional ini.

Kemudian terkait rencana layanan angkutan umum masal perkotaan di Balikpapan tentu kami sangat berterima kasih. Saya pikir beberapa tahun ini ada peningkatan ya di Balikpapan dengan adanya IKN tetapi ini agar dihitung betul jangan sampai pada saat operasional kembali lagi terjadi seperti di beberapa kota lain angkutannya tidak optimal karena mungkin kurang sosialisasi, kemudian fasilitas pendukung lain-lainnya tidak memadai.

Kemudian terkait Dirjen Perkeretaapian rencana pembangunan kereta api dari Balikpapan ke Samarinda kemudian Balikpapan-IKN itu nanti bisa di-update Pak terkait perkembangannya kajiannya sampai di mana. Kemudian untuk BPSDM Pak Joko ada rencana nggak membangun sekolah tinggi terkait perhubungan di Kaltim, penerbangan, darat ataupun pelayaran. Saya mau lihat rencana BPSDM di Provinsi Kalimantan Timur. Kalau BPTJ saya pikir terus Pak tingkatkan apa namanya program-program. Kebetulan saya juga juga tinggal di Jakarta saat ini walaupun domisili saya di Kaltim.

Itu saja Pimpinan terima kasih banyak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Izin Pimpinan saya lupa satu, izin Pimpinan.

Pak Dirjen Darat saya lihat di sini ada halte sungai dua tadi saya sampaikan usulan ada enam bagaimana pun kami di Kaltim itu DAS-nya banyak. Yang DAS terbesar itu DAS Mahakam dan dari sisi kampung ke sebelah sungainya itu sangat-sangat masif alur angkutan itu dan keberadaan halte sungai ini sangat-sangat strategis. Dan terbukti selama ini pasca dibangun tidak mubazir tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga saya pikir untuk tahun 2024 kami sampaikan ada usulan enam dan itu di Kutai Kartanegara yang sudah memang padat juga penduduknya tetapi tata ruangnya itu di sisi kiri kanan Sungai Mahakam.

Itu aja Pimpinan terima kasih

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan izin sebentar menyampaikan aspirasi ini ke Pak Dirjen Perhubungan Darat.

KETUA RAPAT:

Iya silakan-silakan. Iya selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ruslan, kemudian nanti siap-siap Pak Fauzi dan kemudian Pak Boyman, silakan.

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang kami hormati, Bapak Dirjen yang kami banggakan, Bapak-bapak Badan dan seluruh para Kabalai se-indonesia yang berhadir pada hari ini yang sangat kami dambakan.

Terima kasih pertama saya mengapresiasi Bapak Dirjen Darat, Bapak Jenderal yang sangat ganteng pada hari ini, mungkin semalam agak kurang ganteng tapi hari ini lebih daripada ganteng. *Alhamdulillah* Pak Dirjen atas kunjungan Bapak ke Provinsi Aceh beberapa hari yang lalu sudah kita lihat secara seksama. Dan juga harapan masyarakat Aceh baik melalui kami dengan Bapak Gubernur di Provinsi Aceh pada saat itu dengan otomatis dengan sendirinya Bapak sudah mendengar tetapi apa yang Bapak paparkan tadi mungkin barangkali belum tertera di paparan Bapak. Seperti contoh adalah Dermaga Ulele ya Pak, itu tolong di apa diprioritaskan sebab memang itu sudah arahan Bapak Menteri disaat itu dan juga Bapak Dirjen juga ada. Itu sangat-sangat kami mohon Bapak Dirjen untuk keberlangsungan dan jawaban Pimpinan kita di saat kita Kunker kita ke Aceh. Dan Bapak Dirjen perlu diketahui bahwa terminal tipe A di Provinsi Aceh ini ada empat titik di Langsa, di Takengon, di Meulaboh, dan juga Batoh, itu pusat kota Provinsi Aceh dan juga pernah kita kunjungi kemarin di saat bersamaan kita ke Ulele. Itu perlu sentuhan negara hadir untuk memperbaiki keadaan itu adalah pusat kota Provinsi Aceh. Begitu juga di terminal Langsa itu perlu kita dorong kembali kesempurnaannya baik tempat parkirnya dan juga fasilitas-fasilitas lainnya untuk kelengkapan dan supaya kenyamanan masyarakat yang membutuhkan.

Sesuai apa yang disampaikan oleh Pak (suara kurang jelas) tadi jalan nasional di Provinsi Aceh ini lebih daripada 2.000 kilometer tetapi perlu diketahui yang bahwa jalan tersebut perlu perhatian kita semua. Di jalan pesisir itu sangat rawan Pak Dirjen selalu terjadi adalah apa istilahnya bajing loncat. Barang kadang-kadang setelah truk bisa hilang di saat melintasi jalan yang memang menuju daripada Sumut ke Provinsi Aceh, itu sangat perlu perhatian kita semua, terutama adalah marka-marka jalan dan juga lampu-lampu yang perlu diterangkan supaya untuk dihindari hal-hal yang tidak kita inginkan berlaku. Mungkin itu Pak Dirjen Pak Jenderal yang sangat-sangat kami banggakan perlu perhatian Bapak Dirjen untuk tahun 2024.

Nah, Bapak Dirjen Kereta Api yang baik hati *kito* ini sama-sama *Sumatero* ini. Saya pikir sudah beberapa kali sudah kesekian kali dan sudah

tidak terhitung lagi, baik pertemuan kita di kantor, pertemuan kita di komisi dan juga sebagainya. Tapi apa yang Bapak sampaikan tadi ini sangat jauh panggang dari api ini nggak mungkin masak ikan Pak. Coba Bapak sinkronisasikan dengan bawahan Bapak supaya bawahan pun apa yang disajikan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, baik dengan Bapak Menteri, baik dengan Bapak Dirjen. Jadi jangan nanti *last minute* oh ada A yang rusak, ada A yang tidak cukup, ada B yang tidak cukup bla bla bla dan seterusnya padahal kita sudah duduk sudah mulai Hulu sampai ke Hilir. Di saat kita masak disaat kita mau makan ini tidak masak tidak matang Pak Dirjen.

Nah, berbicara mengenai lahan, lahan sudah berkali-kali saya sampaikan yang bawah tahun 2012 yang lalu itu adalah lahan yang ada dari Bireun ke Matang, dari Bireun ke Kota Kutablang itu adalah sudah dibebaskan dari tahun 2012. Ada sedikit yang memang ada kekurangan, belum disempurnakan tetapi adalah ini sangat luar biasa waktunya. Kok masih sekarang adalah masih dibahas ini lahan belum matang belahan belum matang. Coba ini ya Bapak Dirjen coba ini kita ini intopeksi dulu. Apakah yang sebenarnya ini ada keinginan ataupun tidak, apakah ada maunya ataupun tidak maksudnya. Sebab ini kereta api yang sudah dimulai 10 tahun ini baru berapa kilo saja ini, baru berapa kilo. Padahal kereta api ini adalah satu komitmen perjanjian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pusat pada saat itu ini janji politik dulu ini janji politik, untuk mengakhiri konflik Aceh yang berkepanjangan adalah masyarakat Aceh berhak menerima manfaat kereta api sebelum Indonesia merdeka sebelum Indonesia merdeka, itu Pak Dirjen. Tapi sampai saat ini janji politis itu juga belum terealisasi, belum, ini sungguh sangat luar biasa.

Maka harapan kami harapan, harapan kami Pak Dirjen. Tolong akomodirlah harapan, keinginan masyarakat Aceh secara umum secara khusus adalah yang memang yang sekarang ini memanfaatkan itu kereta api jalur Lhokseumawe-Bireuen, jalur Bireuen-Lhokseumawe. Jadi saya pikir itu Pak Dirjen yang perlu saya sampaikan mungkin barangkali. Mohon maaf mungkin ada kekurangan-kekurangan, yang lebih bukan milik kita milik Allah SWT tetapi adalah saya kami mengharapkan bisalah apa yang dihadirkan di provinsi lain bisa juga lah dirasakan oleh manfaatnya masyarakat Aceh apa salahnya, apa salahnya. Jadi sekian dan terima kasih.

*Wallahul muafiq ila aqwamittariq
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya Pak Fauzi, silakan Pak.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E):

Iya makasih

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan, kemudian teman-teman Komisi V, Bapak-bapak, Pak Dirjen dan jajarannya dari Kementerian Perhubungan.

Sudah banyak disampaikan oleh teman-teman, tadi mudah-mudahan saya sedikit bisa melengkapi apa yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama Pak ini mungkin untuk jalan ya Dirjen Darat. Jujur Pak kadang-kadang kita ini agak sungkan Pak kalau kunjungan pribadi saya sendiri belum pernah melakukan kunjungan Reses maksudnya ya di Dapil saya kunjungan ke jembatan timbang. Karena risikonya masyarakat sekarang sudah cerdas pada saat kita berkunjung ada sesuatu yang diharapkan. Pasti kalau kita meninjau jembatan timbang hampir pasti itu tidak bisa kita janji tapi sulit kemungkinan bisa kita lakukan. Makanya sampai saat ini saya belum pernah Pak mengunjungi atau meninjau jembatan timbang. Karena nanti pada saat ditanya wartawan agak kesulitan saya itu nanti pasti, khawatirnya nanti masyarakat menuntut.

Nah, hal ini bila kita korelasikan dengan suasana jalan yang ada di seluruh Indonesia. Saya nggak mau terlalu luas Pak saya bicara di Sulawesi Selatan Pak Dapil saya terkhusus Dapil Sulsel III Pak, itu dampak dari kerusakan jalan salah satunya adalah tidak berfungsinya jembatan timbang itu Pak. Banyak sekali mobil berjajar cukup panjang menghindari itu, ada waktunya oh waktu ini ya bisa jalan mobil-mobil yang *over capacity* ada waktunya ini tidak bisa, jadi mereka sudah paham semuanya. *Nah*, ini harus kita cari jalan keluarnya Pak, apalagi ini kita juga perlu pendapatan negara. Ini pendapatan non pajak kalau ini difungsikan cukup tinggi, cukup lumayan Pak sementara anggaran untuk pembuatan jembatan timbang juga luar biasa Pak. Saya yakin jembatan timbang jangankan jangan-jangan *break event point*-nya saja juga dapat atau tidak itu, begitu, jangan sampai mubazirlah sesuatu yang kita hadirkan. Itu yang pertama.

Yang kedua mengenai terminal Pak. Di Dapil kami ini hampir kendaraan umum Pak agak jarang masuk ke terminal, karena memang fasilitas terminal sangat tidak memadai Pak. Sehingga penumpang pun calon penumpang agak riskan mereka ingin menggunakan alat transportasi dia naiknya dari terminal. *Nah*, saya beberapa Bupati saya ajak bicara kenapa ini nggak di anggarkan, ya permasalahannya tidak ada kemampuan daerah. *Nah*, cuma pada saat saya dorong ternyata statusnya masih kepemilikannya punya daerah Pak gitu belum menjadi milik pusat gitu. Ya harus dicari jalan keluarnya juga itu Pak sehingga tidak terjadi hal-hal yang atau penumpukanlah penumpang maupun mobil di mobil angkutan umum di di apa di pinggir jalan. Itu apakah secara langsung saja diambil oleh pusat atau ada prosedurnya saya sudah paham pada saat teman-teman datang ke Dapil saya Pak Reses itu, itu juga beberapa terminal sedang diproses Pak.

Kemudian di Dapil saya Pak terkhusus di Kabupaten Luwu Utara Pak. Itu daerah baru saja dua tahun yang lalu kurang lebih ada banjir bandang Pak, sekarang *alhamdulillah* infrastrukturnya juga sudah cukup lumayan,

penerangan jalan juga tadi saya sampaikan ke Bapak lampu sudah jalan Pak sudah terpasang ada 92, tapi ada masalah Pak tiga lampu tidak nyala dari awal dipasang dia tidak nyala sebanyak tiga lampu.

Kemudian yang jadi pertanyaan saya ini Pak tadi Bapak saya tanya, anggota Bapak saya tanya terkesan kok menghindar gitu Pak, mengenai *markup* jalan Pak. Sekarang jalan disana sudah besar-besar Pak sementara ada aspirasi kami yang berhubungan dengan itu. Saya dengar-dengar dari TA saya ke luar dari Dapil Pak, ini kan banyak sekali Pak. Jujur saja saya agak riskan Pak Ketua tadi Pak Ketua sampaikan saling menghargai, yang sudah diputuskan disini saja tidak dihargai Pak contohnya aspirasi kita. Saya pribadi 90% *ndak* ada masuk di Dapil Pak dan ini banyak terjadi diteman-teman mungkin teman-teman enggan saja untuk menyampaikan Pak, tolonglah kita saling menghargai ini gitu Pak. Makanya saya saya agak sedikit ini Pak pesimis Pak, yang sudah disepakati saja satu sama lain saling balik badan kok, Pak Menteri lah tidak bicara kita ke bawah ini gimana saya bilang. Semua yang terlibat mengambil keputusan hadir dalam mengambil keputusan ini tapi kenyataannya juga kan nggak jalan, banyak sekali teman-teman seperti ini Pak. Jadi tolonglah masa kita mau besar sendiri Pak, sementara hak kita ini sama Pak.

Saya setuju apa yang disampaikan Pak Hamka itu tadi tapi saya nggak mau apa artinya tidak per Dirjen atau gimana secara keseluruhan memang kondisinya begitu. Kalau kita mau buka-bukaan ya kita buka-bukaan ini *gitu*, kita juga tahu kok sedikit demi sedikit apa kondisi yang terjadi. Kalau kita mau buka-bukaan tapi kita saling menghargai Pak. Jangan pihak kami saja yang menghargai pihak disana tidak menghargai kami. Capek juga Pak datang ke tempat Bapak kayak tukang minta-minta Pak, sementara kami ini payung hukumnya ada undang-undangnya Pak begitu. Kayak tukang minta-minta kita keliling di Kementerian sementara itu sesuatu yang sudah disepakati, tolonglah *gitu*. Kita juga malu Pak menyampaikan ini Pak Tapi karena kita adalah hak kita ini Pak, hak kita dalam memperjuangkan Dapil kita. Karena kita disumpah itu Pak, anggota DPR RI wajib hukumnya memperjuangkan anggaran di Dapilnya masing-masing, loh itu setelah dapat kok nggak dihargai. Tolonglah saya pingin informasi market jalan saya itu apa benar masuk di luar Dapil begitu juga program-program yang lain tidak ada Pak yang masuk di Dapil saya. Dapil saya cuma lampu yang saya tahu sampai sekarang ini yang lain tidak ada.

Kemudian untuk kereta api ya mudah-mudahan lah 2024 ini di ujungnya bisa selesai Pak. Malu juga kami ini Pak ada 5 orang Pak Anggota DPR RI dari Sulsel Pak, kami berjanji di ruang publik dengan pejabat-pejabat mudah-mudahan di priodesasi kami ini selesai Pak ternyata tidak lagi Pak. Perkiraan saya sulit untuk selesai tapi walaupun tidak selesai Pak ya kalau bisa jangan terlalu banyak lah beban Anggota DPR ke depan untuk masalah kereta api ini Pak. Okelah ada beberapa permasalahan tetapi mudah-mudahan permasalahan itu bisa cepat selesai gitu. Dan itu juga yang memang kita benra yang Pak Hamka bilang tadi kenapa kita tidak datang, kita diundang Pak undangannya pertama saya nggak diundang khusus Golkar tidak diundang terus terang saja boleh tanya Pak Hamka, yang lain diundang Golkar tidak

diundang ini ada apa ini. Yang kedua diundang tapi kita tidak ada yang datang karena informasinya perlakuan kami terhadap DPR RI tidak profesional Pak. Kita dapat informasi posisi kita di mana kok kita tidak dihargai sekali Pak. Saya nggak tahu yang protokol mana yang menyusun itu *gitu*, hargailah kami ini Pak. Iya kita hargai Bapak tapi tolonglah kita saling menghargai.

Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita kedepan begitu. Kalau begini-begini terus ya akhirnya kita tiap rapat selalu begini Pak dan apa yang kita putuskan tidak pernah kita jalankan. Mari sama-sama kita pandai kita mengambil keputusan juga pandai kita Pak menjalankannya Pak. Saya pikir itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya saya persilakan Pak Boyman, kemudian siap-siap Pak Fadholi.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Baik terima kasih.

**Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati.
Bapak Dirjen, seluruh mitra kerja Komisi V yang saya hormati.**

Pada intinya barangkali semua sudah disampaikan Pak. Untuk perbaikan kedepan tentang kinerja mitra kerja Komisi V ini, baik Perkeretaapian, Dirjen Darat, masalah transportasi dan sebagainya intinya seperti itu. Mudah-mudahan kemitraan kita ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, tentu tujuannya tidak lain agar masing-masing tugas dan kewajiban kita bisa sejalan searah. Saya dari Kalimantan Barat I ingin mengingatkan kembali khusus kepada Dirjen Darat Pak.

Yang pertama berkaitan Pelabuhan Penyeberangan ASDP di Kabupaten Keptang Pak. Jadi rutinitas kegiatan kapal Semarang dan Keptang itu kalau nggak salah satu minggu tiga kali tapi Pelabuhan resminya belum ada Pak di Kabupaten Keptang Pelabuhan ASDP-nya.

Yang kedua berkaitan dengan masalah Pelabuhan ASDP Bangka Belitung Pak di Kabupaten Keptang yang mangkrak sudah hampir 10 tahun sampai sekarang belum dimanfaatkan Pak. Padahal itu sudah dibangun bahkan sudah hancur kembali Pak itu fasilitas umumnya. Saya minta agar ditinjau ulang untuk bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yang ketiga Pak berkaitan dengan masalah halte sungai. Saya minta agar halte sungai ini Pak direalisasikan Pak di 2024 ini. Karena daerah kami

khusus Kalimantan itu, itu memang mayoritas sungai Pak tetapi masalah haltenya itu belum memenuhi syarat untuk sebagai transportasi yang aman, nyaman membuat masyarakat itu tidak ada kendala apapun gitu. Saya tidak tahu itu apakah ada Kabalai dari Kalimantan Barat untuk berhubungan hadir, hadir nggak? Iya *alhamdulillah*. Jadi kalau kami Kalimantan Barat *alhamdulillah* Pak agak beda ini, mudah-mudahan semuanya kaya Kalimantan Barat Kabalainya bagus Pak. Artinya kooperatif kapanpun kita bisa komunikasi dan Kabalainya juga sering memberi tahu dalam setiap kegiatan. Semoga Balai di Kalimantan Barat ini menjadi motor untuk kita semua agar kerja sama kita bisa berjalan dengan baik.

Saya pikir itu Pak ya yang mana bagus tetap bagus *gitu* nggak boleh juga kita sama rata. Yang kurang bagus kita perbaiki, ya Pak Hamka ya agar menjadi baik *gitu*. Saya pikir itu Pak yang lain-lain saya pikir semoga bisa terlaksana dengan baik kemitraan kerja kita ini, semoga harapan kita untuk menjadikan negara kita ini negara yang maju sesuai dengan harapan kita akan tercapai, begitu saja Ketua.

Izin mau menyampaikan yang sangat prinsip biar Dirjen ingat *gitu* kalau nggak takut lenyap.

KETUA RAPAT:

Silakan-silakan Pak Boyman.

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD):

Izin Pak Ketua sedikit, sedikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Interupsi ya interupsi

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD):

Iya interupsi. Mohon izin Pak Dirjen Kabalai Aceh ada nggak datang ini? Oh gantengnya minta ampun, baik. Kereta api, kereta api kan satu Sumatera kan dengan Aceh, hadir nggak hadir nggak kereta api? nggak ya? Naik haji ya? Oh ya, mabrur mabrur.

KETUA RAPAT:

Iya selanjutnya saya persilakan Pak Fadholi, kemudian siap-siap Pak Sumail, yang terakhir Pak Syahrul.

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V.
Yang saya hormati seluruh mitra yang hadir, Pak Dirjen Darat, Pak Dirjen
Perkeretaapian, BPSDM dan juga Bapak Dirjen Transportasi Jabotabek
dan seluruh yang hadir dari Kabalai.**

Hari ini merasa sangat luar biasa karena RDP ini diikuti oleh seluruh Kabalai. Yang pertama saya karena nanti akan ada penajaman rapat dengan masing-masing Dirjen secara spesifik dan karena saya mendapatkan materi itu baru tadi pagi, sehingga saya belum bisa melakukan satu pendalaman yang lebih jauh. Maka ada beberapa hal yang nantinya menjadi catatan tentu saya harus mempelajari secara detail dari apa yang sudah disampaikan dan nanti akan kami sampaikan di kemudian hari. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal saja yang mungkin secara spesifik dan umum, karena saya belum bisa belum bisa menyampaikan hal yang secara spesifik dan juga secara detail. Mengingatkan saja besok ada kunjungan ke Salatiga secara spesifik ya. Mohon agar yang dikirim yang menghadiri dari Dirjen itu yang nantinya juga yang bisa ikut mengatasi persoalan. Sehingga ketika pendampingan terhadap kunjungan spesifik Pak, ini tolong dari Pak Dirjen siapa yang diutus itu yang nantinya sekiranya menguasai persoalan dan bisa memberikan solusi disitu bukan hanya sekedar ditampung, sehingga kita kan bisa ada satu komunikasi.

Kemudian yang kedua, yang Pak Dirjen Darat ini ada beberapa hal terkait dengan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Provinsi Jawa Tengah. Saya tidak menyoroti di Provinsi lain karena saya ada di Dapil Jawa Tengah, di sini yang di wilayah Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal ini belum ada sama sekali. Jadi ini hanya perbatasan Batang dan Kabupaten Kendal. Padahal kami juga sudah banyak koordinasi dan saya juag terima kasih kepada Kabalai di Jawa Tengah ini cukup proaktif lah dengan saya. Jadi kasusnya mungkin berbeda tapi yang dari Jawa Tengah ini sangat bagus dengan saya. Mudah-mudahan ini menjadi tauladan dari seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hamka itu mungkin kasus-kasus spesifik, tapi ini saya terima kasih sama Pak Hamka juga tapi khususnya Jawa Tengah saya sampaikan terima kasih cukup komunikatif dengan saya. Ada Pak Eko ada Kabalai Kereta Api juga bagus itu. Jadi yang secara spesifik Jawa Tengah Pak nanti kami akan sampaikan. Wilayah Kabupaten Semarang, kemudian Kendal ini belum masuk di wilayah ini, tapi ada hal-hal yang kemarin juga sudah di survei dan sudah kita ajak untuk jalan sama Pak Eko tapi kenapa belum masuk di sini Pak Eko, ini tolong disampaikan.

Kemudian yang kedua BPSDM saya ucapkan terima kasih sekali banyak hal yang sudah maju tetapi disini ada PIP Semarang Pak ini PIP Semarang, ini saya harapkan nanti bagaimana di sini kan ada program padat karya nanti padat karyanya itu bisa betul-betul dikenal dengan masyarakat. Dan bilamana perlu ini mungkin perlu ada satu komunikasi dan juga ada sosialisasi keberadaan PIP ditengah-tengah masyarakat. Khususnya di lingkungan sekitar ya di Semarang itu agar saya senang ketika kemudian PIP itu citranya akan lebih bagus sebagai lembaga pendidikan yang mencetak banyak hal. Ini harapannya ada sosialisasi PIP dan pembangunan gedungnya itu juga Jawa Tengah ini Provinsi yang cukup besar, kemudian juga sangan bagus, ini

mungkin ada perlu ada satu peningkat seperti tadi yang disampaikan oleh Mbah Jadi, ini menjadi bagian yang sangat penting. Tapi pada perinsipnya pelaksanaan pendidikan PIP ini juga sudah cukup bagus lah tetapi kalau kemudian bisa ada sosialisasai di tengah-tengah masyarakat itu gaungnya, oh betul-betul PIP ini bagus.

Kemudian berikutnya ini hal-hal yang lain Perekertaapian Pak. Dua kali ini saya sampaikan di Perkeretaapian kaitannya dengan pembangunan jalur kereta api yang ada di wilayah Tuntang itu loh Pak. Jadi ini gak tahu ini apakah itu kemungkinan bisa diteruskan atau tidak. Karena ketika dulu ada pembangunan itu itu sudah menggusur warga yang sangat luar biasa itu, sudah dibangun, sudah dikeduk, sudah kaya gini, tapi sekarang ditanami jagung Pak. Jadi memang kapan-kapan ini tolong nanti Perkeretaapian yang di Jawa Tengah ini bisa kita ajak bareng-bareng lah. Kabalainya mana, Kabalai dari Jawa tengah oh iya, oke Pak nanti kita sama-sama Pak. Karena itu sebetulnya diharapkan masyarakat betul bahkan di wilayah situ itu sudah ada pasar sudah digusur ya, rumah sudah digusur sekarang sudah digusur, bagus itu ya. Cuman sekarang kereta apinya yang belum datang-datang jagungnya yang tumbuh Pak gitu loh. Nah, ini ditanami jagung sekarang, bisa dicek itu Pak nanti bisa di cek betul-betul di lapangan.

Nah, ini mungkin karena itu diharapkan itu kan disamping kereta wisata, tetapi juga menjadi jalur alternatif transportasi. Karena ini sudah kasep Pak sudah di kasep dibangun kayak gitu sayang kalau nggak diteruskan, sayang aja kan. Saya pikir sudah dulu perencanaannya sudah sampai tuntaskan, cuman sekarang masih belum bisa megang.

Pada perinsipnya untuk layanan kereta api juga udah bagus Pak kami melihat di lintasan-lintasan sudah bagus, cuman nanti ada beberapa yang saya mintakan di lintasan kereta api di wilayah Kendal, kemudian di Kota Semarang itu Pak, ini rambu-rambunya ini ada yang masih perlu atensi yang lebih bagus Pak. Yang terutama pada lintasan-lintasan yang rawan kecelakaan, ini kan ada kayak di Kali Ungu, kemudian ada di Berangsong, kalau titik-titik saya hapal Pak. Jadi titik-titik wilayah lintasan kereta api yang kemudian di ada jalur jalan untuk masyarakat yang di situ mungkin rambu-rambunya perlu diperbaiki dengan baik. Saya pikir itu mungkin juga mungkin kalau padat karyanya juga nanti tolong dikomunikasikan dengan baik yang kaitannya dengan padat karya di wilayah Stasiun itu juga bagus.

Secara umum ya saya mengucapkan apresiasi dan saya memberikan penghargaan lah kepada Pak Direktur Perkeretaapian ini tetapi penghargaan saya bukan berarti tanpa harus keritik saya tetap memberikan satu kritik. Karena kritik ini adalah bagian dari untuk bisa memperbaiki kinerja. Jadi kalau saya tanpa kritik berarti itu *njebloske* Pak kan gitu, maka ada kritik ini menjadi satu hal yang sangat bagus.

Hanya itu saja yang saya sampaikan, Pak Ketua saya terima kasih.

Akhirul kalam

*Wallahul muwafiq ila aqwamittoriq
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya saya persilakan Pak Sumail, kemudian nanti Pak Syahrul dan ini ada Pak Anwar Hafid ternyata datang, terakhir ya Pak Anwar abis ini. silakan Pak Sumail.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Iya baik terima kasih.

Asssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Bapak-bapak Dirjen dan Kepala BPSDM dari Kereta Api, Perhubungan Darat, semua Kabalai-kabali yang diundang dari seluruh Indonesia.**

Tentu rapat ini sangat penting dan tadi beberapa sudah disampaikan secara terbuka oleh kawan-kawan. Apa poinnya, poin pentingnya adalah bagaimana kita meningkatkan koordinasi saja Pak. Koordinasi sehingga apa yang menjadi keinginan dan kepentingan masyarakat banyak itu bisa terakomodir melalui sisiran-sisiran anggaran yang kita sepakti bersama disini.

Pertama saya akan coba memberikan catatan terhadap Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Beberapa kali dan kesempatan memang kita bisa berkoordinasi dengan baik kaitannya dengan titik-titik rawan dalam penyeberangan yang ada di Jawa Timur Pak, terima kasih. Tempo hari dengan Direktur ASDP dan hari-hari terakhir ini kita panggil di mana gelombangnya karena cuaca yang ekstrim glombangnya sangat tinggi, sehingga mobil-mobil yang mau menyebrang kesana sampai kira-kira 10 km di bagian sisi utara dan selatan.

Tentu ini karena menjadi kewenangan dari Direktorat Jenderal Darat perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan ASDP dan instansi terkait, terutama dari pihak Kakorlantas sehingga orang-orang yang mau beraktivitas ke luar masuk Banyuwangi-Jember yang tidak mau menyebrang ke Bali tidak terganggu. *Nah*, dengan tersendatnya dan terganggunya penyeberangan Ke Bali akibat cuaca ekstrim tentu ini sudah mengganggu perekonomian Pak.

Kemarin pada saat rapat dengan Kementerian PUPR saya usulkan sudah saatnya jembatan penyeberangan Jawa dan Bali ini segera dilakukan dengan koordinasi dengan para saudara-saudara kita pemangku adat yang ada disana tanpa meninggalkan atau tanpa atau tidak tanpa mengurangi rasa hormat terhadap apa yang menjadi keyakinan dan budaya masyarakat setempat yang ada di Bali. Itu yang pertama.

Yang kedua Pak Dirjen berdasarkan catatan hampir dua jam sekali di Indonesia ini terdapat dua orang yang meninggal Pak. *Nah*, sementara dari anggaran, dari rencana kerja di tahun 2023 dan di 2024 ini saya belum melihat masih negara tuh dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan ini. Artinya apa juga negara tidak hadir dan sengaja membiarkan warganya tiap dua jam itu mati Pak meninggal, ini sangat miris sekali.

Dan ketiga Pak Kabalai, Pak Dirjen saya mohon dijelaskan nanti kaitannya dengan sistem pelayanan transportasi yang ada di IKN yang kurang lebih nilainya 86 miliar ini seperti apa gambarannya. Karena kita ingin tidak lagi melihat kerumitan-kerumitan ataupun transportasi karena disana sistemnya modern yang saya dengar dan tentu juga harus berbeda dari tempat-tempat lain yang ada di Indonesia.

Yang keempat saya mendengar di NTT Pak ada dua terminal. Jadi terminal Endagung sama Batu Alo itu dananya ada tapi tidak operasionalnya tidak berjalan seperti itu dan terminalnya tidak difungsikan. Jangan sampai anggaran yang kita sudah letakan *implacement* di sana itu menjadi mubazir karena kurangnya perhatian dari Kemntrian atau Direktorat terkait kaitannya dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Direktorat Jenderal Darat ini.

Saya kira itu 4 poin Pak Dirjen untuk menjadi atensi terkhusus yang di Gilimanuk sekarang Pak, lima hari sudah Pak, mohon Bapak bisa cek secara langsung kesana. Rencana saya hari Jumat datang kesana meninjau dan kita akan coba libatkan juga Pemerintah Daerah bila memungkinkan juga Pemerintahan Daerah Bali, agar kiranya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat kaitannya dengan saat tertentu ketika cuaca ekstrim.

Berikutnya dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pak Direktorat Jenderal, saya izin intraksi ini Pimpinan ya sebentar aja kaitannya dengan *update* Kereta Api Cepat Pak Jakarta-Bandung. Saya ingin mendengar Pak silakan dulu Pak.

KETUA RAPAT:

Tapi umum saja Pak ya nggak usah terlalu lama nanti kan ada sesi penjelasan nanti.

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Siap baik Bapak. Terkait Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung saat ini memang kita sedang *posisitas commisionning* dan dalam pengujian dan nantinya setelah itu kita keluarkan izin operasi dan nantinya akan direncanakan tanggal 18 Agustus bisa dicoba dan COD-nya atau tanggal operasi komersil pada tanggal 1 Oktober Pak. Jadi untuk kereta api cepat seperti itu kondisinya Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik terima kasih Pak Dirjen penjelasannya. Kita oke kita sudah sepakati ini tentu *update*-nya kita harus selalu lakukan Pak, karena masyarakat juga menunggu. Jangan sampai Kereta Api Cepat justru menjadi kereta api lambat dan biayanya terus membengkak terus membengkak. Saya pahami bahwa di titik-titik tertentu itu sebagai upaya sebenarnya daripada konglomerat untuk meningkatkan nilai atau *revenue* asetnya, sehingga terkesan bahwa kereta api ini berjalan ditempat dan terus membengkak biayanya. Ini menjadi tanggung jawab Bapak selaku pemangku kewenangan di sana.

Nah, saya tidak melihat Pak Dirjen bahwa ada pengembangan di wilayah saya Pak, Situbondo, Banyuwangi, dan Bondowoso. Sebagaimana tadi sampai teman-teman menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang MD3 kami dituntut itu Pak untuk memperjuangkan wilayah Dapil. Maka tadi kami juga menyebutkan kiranya Kabalai menyampaikan ke kami via telepon dan lain sebagainya, kira-kira apa yang bisa kita distribusikan program-program yang untuk kerakyatan yang disana, baik untuk misalnya perbaikan kereta apinya bukan padat karyanya Pak ya. Maksud saya program-program besar sebagai representasi dari kami Komisi V yang ada di sana seperti itu. Jangan kemudian tidak ada bedanya Pak bahkan justru yang tidak ada Komisi V-nya, Jember terus kemudian Lumajang kereta apinya perbaikannya begitu besar, sementara Dapil saya ini justru kurang baik bagi kami yang ada di Dapil. Tentunya juga Fraksi menempatkan saya di Komisi V punya keinginan-keinginan dan memandang bahwa di daerah sana fasilitas perkeretaapiannya juga kurang baik atau perlu ditingkatkan kembali.

Yang kedua kaitanya dengan PNPB Pak Dirjen, realisasinya hingga bulan ini masih 30% artinya hal yang rendah, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak ini apabila dioptimalkan merupakan sumbangsih besar juga bagi APBN dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan di wilayah-wilayah seluruh Indonesia.

Saya kira itu catatan penting saya. terima kasih Pak Dirjen Perhubungan Darat, bila memungkinkan hari Jumat ada di sana Pak. Jadi secara lisan kami mengundang juga mungkin dari kereta api ya, karena melihat persoalan yang ada di Ketapang-Gilimanuk saat ini.

Demikian terima kasih

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya Pak Syahrul kemudian nanti siap-siap Pak Anwar Hafid yang terakhir.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Baik terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Dirjen, para Dirjen dan seluruh staf dan pejabat di Kementerian
Perhubungan.**

Pertama saya ingin menyampaikan *alhamdulillah* kalau hubungan saya dengan Kepala Balai yang ada di Riau hanya Kepala Balai Perhubungan Darat Pak, *Alhamdulillah* Pak Yugo hadir Pak Yugo? *Alhamdulillah* baik Pak dan komunikasi kita lancar selalu berkoordinasi dalam program-program. Hanya saja yang perlu yang kami sampaikan bahwasanya program untuk 2023 itu banyak yang belum *clear* sama sepertinya nasib kawan-kawan ini. Padahal kalau untuk program 2024 efek elektoralnya tidak besar lagi Pak kata Pak Sudjadi. Karena program ini akan dilaksanakan tentu setelah Pemilu ya tapi memang bukan itu yang menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita membahas ini kan bagaimana memberikan pelayanan perhubungan bagi rakyat tetapi diharapkan tentunya program yang sudah kita sepakati kemarin di tahun lalu untuk kita laksanakan di tahun ini, mohon kepada Pak Dirjen agar memantau seluruh sampai ke bawah. Karena kadang-kadang karena tidak dipantau sampai ke bawah ya di bawah lalu saja Pak. Jadi program yang sudah kita sepakati bahkan sudah kita sampaikan ke masyarakat jangan sampai itu tidak dilaksanakan.

Kemudian yang ketiga ini saya lihat BTS ini tahun ini masih ada anggaran 600 miliar. Pak kalau tahun lalu hampir juga anggarannya seperti itu, tahun sebelumnya juga segitu. Awal kegiatan ini hanya 200 miliar 200 an miliar, 5 kota sekarang ada 10 kota, di mana satu kota itu disubsidi oleh negara transportasinya 50 miliar yang anehnya kita ingin meminta. Saya sudah rasanya sudah tiga kali saya minta untuk Kota Pekanbaru yang sekarang ini luar biasa macetnya Pak. Hanya minta dukungan saja bantu subsidi yang sekarang ini angkutannya itu dikelola oleh BUMD Pak. BUMD Pekanbaru itu dengan kondisi sekarang mereka harus mensubsidi transportasi kotanya itu 19 miliar. Saya minta keringanan saja untuk Pekanbaru ini supaya mereka minta 10 miliar lah minimal agar bisa memperluas. Karena Transmetro Pekanbaru itu tidak hanya melayani di kota Pekanbaru tetapi Kota Kabupaten yang ada di sekitarnya. Karena ada program namanya Sekawan (Siak Kampar Pelalawan dan Kota Pekanbaru).

Nah, saya minta hanya apalagi ini yang melakukan BUMD Pak, mintalah dibantu 10 miliar Pekanbaru untuk bisa memperluas jangkauan transportasinya bagi masyarakat Pekanbaru. Apalagi saat sekarang ini Pak angkot tidak ada lagi di kota Pekanbaru, dulu ada angkot. Karena kondisi sekarang masyarakat memang banyak menggunakan transportasi sepeda motor, sehingga angkot tidak menjanjikan, tak ada lagi angkot Pak. Makanya kalau masyarakat yang memang tidak punya angkutan tidak punya sepeda motor yang diharapkannya adalah Transmetro Pekanbaru. *Nah*, mudah-mudahan bisa diperluas sampai ke Kampar sampai ke mana kalau bisa dibantu melalui BTS ini.

Dan kita berharap Ketua Pimpinan kita berharap ada tadi ada beberapa anggota yang menyoroti juga BTS ada pembahasan khusus kita ini tentang BTS ini evaluasi. Karena anggarannya cukup besar ini 500 miliar dua tahun saja sudah 600 miliar dua tahun saja sudah 1 triliun. Kalau kita bawa ke program-program lain. Contoh nih, untuk jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2024 Riau itu hanya mendapat jatah 2 trayek saja dan 9 bus padahal kebutuhannya banyak. Dan saya lihat Provinsi lain sampai 7 trayek, ada 8 trayek, ada 10, Riau yang hanya 2 trayek saja dan 9 bus. Saya tidak mau ini anggarannya hanya segini Pak, saya minta trayek ini ditambah. Karena dengan kondisi sekarang kalau masyarakat swasta, pengusaha swasta membuat trayek nggak nutup Pak. Apalagi BBM naik maka butuh ini subsidi dari Pemerintah, butuh Pemerintah hadir untuk kebutuhan pelayanan. Apalagi visi misi daripada Perhubungan ini hadir untuk memberikan pelayanan transportasi bagi masyarakat.

Kemudian yang kelima jembatan timbang Pak. *Nah*, ini pertanyaan saya sudah beberapa kali saya sampaikan ke Kementerian Perhubungan. Saya minta ini jawabannya tidak tertulis Ketua karena sudah saya tanyakan beberapa kali tapi saya tidak pernah dapat jawabannya. Jembatan timbang ada di kita di Kementerian Perhubungan itu salah satu fungsinya adalah untuk mengawasi ODOL yang ada di jalan nasional. Pertanyaannya bagaimana dengan jalan daerah Pak, jalan Kabupaten dan Provinsi, kan kewenangan jembatan timbang ini kita tarik ke pusat, Provinsi tidak punya jembatan timbang, Kabupaten tidak. Ini ada nggak regulasi yang kita keluarkan tentu melalui Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah nanti Pemerintah, untuk bagaimana mengawasi jalan-jalan Kabupaten dan Provinsi. Kita dihadapkan dengan kondisi jalan kabupaten itu kemantapannya itu di bawah 60%, itu bukan karena Kabupaten tidak membangun tetapi jalannya itu rusak Pak. Contohnya saja di Riau jalan nasional bagus 90 ke atas kemantapan jalannya tetapi yang rusak itu jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Karena truk-truk sawit, truk CPO itu nggak kuat kalau jalan Kabupaten harus dilewati oleh truk-truk sawit yang ODOL, jalan nasional saja tidak sanggup apalagi jalan Kabupaten dan Provinsi. *Nah*, untuk jalan nasional ada pengawasannya melalui jembatan timbang tetapi untuk Kabupaten dan Provinsi mana regulasinya. Saya mohon ini jawabannya kalau bisa ini Pak kalau ini belum ada regulasinya agar kemudian kita pikirkan untuk kita masukkan di dalam revisi undang-undang jalannya nanti, angkutan mohon maaf.

Kemudian yang ke enam Pak BPSDM. Kalau ada rencana Kementerian Perhubungan untuk membuka sekolah baru sekolah tinggi perhubungan, kebetulan di Kampar itu ada tidak jauh dari Pekanbaru masih di jalan nasional SPN samping SPN ada sekarang tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah. Kalau memang ada peluang untuk dibangun di sana sekolah tinggi kita bisa komunikasikan dengan Pemerintahan Daerah. Dulunya direncanakan untuk STPDN dibebaskan lebih kurang 113 hektar, kemudian dibangun sekarang SPN sampingnya juga ada Brimob. *Nah*, kalau memungkinkan kalau ada itu akan menjadi tentu dengan adanya kehadiran sekolah tersebut bisa memberikan efek yang positif bagi lingkungan Kabupaten Kampar.

Terima kasih

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Kemudian Pak Anwar Hafid silakan Pak.

F-P. DEMOKRAT (ANWAR HAFID):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian.

Bapak-bapak par Pimpinan para sahabat Komisi V yang saya muliakan, Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman Kepala Balai seluruh Indonesia juga yang hadir.

Pada kesempatan ini yang pertama kalau melihat laporan yang disajikan ini saya tidak punya alasan dan tidak punya kekhawatiran sedikitpun, bahwa segala progres yang sudah sedang berjalan *insya Allah* masih berjalan dalam batas yang normal belum ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Realisasi dan juga keuangan maupun fisik saya kira masih dalam ambang batas toleransi sehingga tidak ada satu hal yang saya ingin saya sampaikan.

Yang kedua Pak ada beberapa hal sebetulnya saya laporkan khususnya yang dari Dapil saya Sulawesi Tengah. Yang pertama saya ingin melaporkan mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah itu adalah salah satu provinsi yang memiliki jalan nasional terpanjang kedua di Indonesia, kurang lebih 2.343,7 km. Namun kalau saya melihat Pak anggaran yang ada di Balai khusus untuk perlengkapan jalan itu sangat minim tidak seimbang dengan panjang jalan nasional yang ada. Sehingga tentu ini harapan saya perlu dipikirkan Pak kita dalam proporsional sehingga kedepan 2024 bisa menjadi pertimbangan ini, panjang jalan dengan alokasi anggaran yang diberikan setiap Kabupaten itu setiap daerah itu. Saya lihat hanya 26 miliar Pak dengan total panjang jalan seperti itu sehingga mudah-mudahan 2024 menjadi perhatian.

Yang kedua saya juga ingin menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah itu adalah, kita semua ketahui salah satu daerah prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi tahun 2018 yang lalu. Ada beberapa hal Pak yang perlu mendapat perhatian yaitu rehab UPPKB Kayumalue itu Pak. Kemudian Rehab Terminal Mamboro dan Terminal pembangunan alat penerang jalan di Huntap (hunian tetap). Hampir sebagian besar hunian tetap masyarakat yang ada di kota Palu Kabupaten Sigi dan Donggala itu tidak ada sarana penerangan jalannya. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita sekalipun memang mungkin regulasi karena ini tidak masuk di dalam jalan nasional tapi ini adalah kewajiban kita Pak, kewajiban

semua Kementerian sesuai dengan Instruksi Presiden dalam rangka membantu pemulihan pasca bencana tersebut.

Nah, kemudian yang ketiga saya juga ingin mungkin menyampaikan Pak kepada BPSDM. Perlu ada gambaran juga bagi kita Pak, dari sekian banyak lulusan-lulusan sekolah kita itu terserap ke mana aja mereka ini Pak. Karena memang kalau saya lihat sekolah-sekolah kita luar biasa ya, animo masyarakat juga sangat besar. Kita hanya ingin mendapatkan informasi saja sehingga ke depan dalam kita merencanakan bersama-sama anggaran di sekolah-sekolah itu kalau memang ini menjadi satu jalan ke luar dalam rangka upaya kita untuk meningkatkan ya membuka lapangan kerja, kemudian juga yang kedua mencetak generasi-generasi kita yang berkualitas ke depan sesuai dengan bidangnya, maka perlu juga ada informasi setiap rapat-rapat ini bahwa sekolah-sekolah ini telah menghasilkan begini begini dan begini. Sehingga ini akan mendapat dukungan yang sangat besar tentu secara politis dari mitra Komisi V ini.

Saya kira itu saja Pak tiga hal, terima kasih Pimpinan.

*Wallahulmusta'an,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya dari meja Pimpinan ada dua, yang pertama Pak Ridwan Bae dan kemudian Pak Roberth Rouw. Silakan Pak Ridwan Bae.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) - WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Pak Iqbal.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen, baik itu Dirjen Darat, Dirjen Kereta Api,
BPSDM, dari Kepala Badan Pengelola Jabodetabek juga beserta seluruh
jajaran.**

Sudah banyak teman-teman menyampaikan semua ya dan saya kira dari Pemerintah sudah mendengarkan secara baik semuanya, saya cuma masuk ke Dapil saja Pak.

Yang pertama saya minta dengan Dirjen Darat Pak. Itu di Sulawesi Tenggara terdiri dua wilayah yaitu kepulauan dan daratan. Disana sudah terbangun Feri penghubung antara kepulauan dan daratan tadi, yaitu Amolengo Feri Amolengo dan Labuan. *Nah*, itu dua wilayah ini sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa. Di kepulauan itu memiliki potensi ada aspal disitu, kemudian daerah ikan juga di kepulauan banyak sekali, belum lagi mutiara dan lain-lain masih banyak ada di sana Pak. Di daratan tentu itu banyak

lagi ada perak ada apa namanya nikel dan di kepulauan tadi juga menghubungkan antara Makassar, Surabaya, Maluku dan Papua, itu menghubungkan melalui pelabuhan laut jadi sangat ramai Pak disitu. Nah maksud saya kalau bisa itu juga bisa dipikirkan untuk ditingkatkan terminal maupun pelabuhan ferinya. Ya minimal tidak seperti Bakauheni apa itu namanya Bakauheni-Merak iya tapi mirip-mirip seperti itu barangkali bisa dipikirkan tentu dalam pemikiran jangka panjang Pak.

Yang kedua di Weni itu Pak menghasilkan nikel juga Pulau Weni namanya, namanya itu adalah Kabupaten Konawe Kepulauan. Di sana sudah ada pelabuhan feri tetapi bahkan kapalnya pun sudah ada dan biaya untuk subsidi dari perhubungan sudah ada, tetapi pelabuhannya Pak tidak bisa disandari oleh feri karena dia menyamping Pak, sementara feri itu kan harus muka atau belakang. Pelabuhannya itu hanya disandari Kapal Feri itu adalah dalam keadaan menyamping. *Nah*, maksud saya itu adalah namanya rencana pelabuhan-pelabuhan Sawaea, Sawaea Kabupaten Konkep Pak, itu akan menghubungkan pelabuhan Langarah feri yang ada sekarang dengan Labuan yang menuju juga di daerah Buton dan Buton Utara, kemudian Bau-bau, kemudian Buton Selatan, Buton Tengah Kabupaten Muara begitu luas dia punya wilayah Pak. Itu juga saya minta bisa dipikirkan tahun 2024 ini.

Saya kira dua hal itu Pak yang saya harapkan, yang lain sudah titip panjang kepada Pak Dirjen ya dalam bentuk permohonan dari Dapil-dapil kami yang menjadi aspirasi masyarakat kami. Tentu barangkali untuk lebih meyakinkan itu Pak Dirjen mungkin dari Kepala Balai Bapak yang ada di sini Pak Riyandi mungkin ada hadir di sini bisa dipanggil untuk bisa menjelaskan itu. Ya Pak Riyandi tolong Pak Riyandi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen lebih jauh tentang manfaat kalau itu bisa ditingkatkan manfaat jangka panjangnya.

Pak Ketua terima kasih pak Iqbal ya, tapi izinkan saya mau ke BPSDM ada saya mau menyerahkan sedikit barang ya sebentar Pak ya.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak silakan.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Pak Ketua sambil mau tahu Kabalai Jateng dateng nggak ya kereta api sama darat.

KETUA RAPAT:

Ada, hadir? hadir Bu

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Lihat dong sebentar soalnya saya tadi belum lihat. Nggak, nggak, nggak, nggak, ya, ya, Kereta api iya, kalau darat? Oh, ya udah itu saja sih Pak.

Pak Ketua kalau penentuan tanggal koordinasi *gitu* jangan kita dikasih tahu seminggu tapi nggak koordinasi tanggal *gitu*.

KETUA RAPAT:

Sudah sudah tadi Bu. Iya silakan Pak Roberth.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Ketua.

Ketua dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati, Saudara Dirjen Perhubungan Darat, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, saudara Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan para Kepala Balai seluruh Indonesia yang hadir pada siang hari ini.

Pertama saya juga ingin melihat Kepala Balai kami yang ada di sini, Kepala Balai Papua? Oke. Sebenarnya saya mau marah juga Pak sama kaya Pak Hamka, karena saya belum pernah, oh Bapak suruh saya marah ya, baik.

Yang pertama kami itu Papua itu mempunyai satu kekhususan yaitu daerah otonomi khusus, itu dijamin oleh negara. Untuk itu ada kekhususan-kekhususan dan diskresi khusus Pemerintah untuk hadir di Papua. Maka kalau kemarin kita lihat rapat dengan Dirjen Bina Marga, Kepala Balai di Papua itu anak-anak Papua semua. Saya lihat saya udah tahu ini dari Papua dan koordinasinya sangat baik. Mereka selalu telpon kaka, kami saya sekarang yang jadi ini koordinasinya baik Pak. Yang namanya Kepala Balai yang dari perhubungan belum pernah satupun menghubungi kami dan tidak pernah saya rapat di dalam sini ada anak Papua satupun di dalam sini. Pertanyaan saya apa kekhususan yang diberikan oleh Pemerintah ini tidak diikuti oleh teman-teman di Kementerian Perhubungan. Ini catatan penting Pak Dirjen, saya mohon ini menjadi catatan penting untuk nanti harus ada Kepala Balai kami di Papua itu orang Papua.

Maka itulah bagaimana kami dihargai yang sekian lama kami dilupakan. Begitu Pemerintah sudah memberikan satu diskresi khusus dengan memberikan otonomi khusus yang begitu kami melihat sudah banyak manfaat dan keterwakilan anak-anak Papua di semua jajaran, di Kepolisian, TNI dan lain-lain, di Kementerian Perhubungan belum ada sama sekali saya lihat. Jadi saya mohon Pak Dirjen ini catatan penting Pak Dirjen. Kepala Balai Papua tolong nanti saya belum pernah dihubungi oleh saudara ya. Kepala Balai Kereta Api kami nggak ada Pak karena kami tidak punya kereta api ya. Jadi dan ini penting sekali saya kira BPSDM kami titip untuk bagaimana anak-anak Papua lebih banyak lagi bisa diberdayakan sumber daya manusianya ditingkatkan melalui tempat Bapak.

Baik saya masuk ke sesuai topik kita anggaran 2023 saya kira tadi saya dapat info dari Pak Iqbal bahwa Bapak sudah tadi ketemu khusus untuk membicarakan masalah program-program kita. Untuk masalah PJU bus yang sudah kami sosialisasikan sampai sekarang belum ada titik terang tapi tadi katanya sudah ada kesepakatan maka saya tidak akan masuk ke sana. Cuman saya ingatkan bahwa itu semua program-program yang sudah diberikan kepada kami, kami sudah sosialisasikan ke daerah kami. Mohon jangan sampai ini tidak terakomodir Pak, mohon catatan penting.

Yang berikut saya ingin menyampaikan bahwa kita bicara APBN 2024, kami Anggota Dewan ini dibebani dan diamanatkan oleh undang-undang untuk memperjuangkan aspirasi dari daerah kami, itu undang-undang. Maka undang-undang juga untuk menugaskan kami tiga yaitu legislasi untuk membuat undang-undang, anggaran membahas anggaran yang sekarang kami lakukan dan pengawasan. Maka saya kira kita bicara 2024 saya lihat di apa yang disampaikan oleh saudara Dirjen dan teman-teman, tidak ada disitu satu *space* khusus bahwa ini ada *space* aspirasi Anggota DPR sesuai dengan amanat undang-undang. Itu sebenarnya harus ada di dalam setiap kita membahas itu agar di situlah aspirasi-aspirasi anggota yang dibawa dari daerah itu bisa tersalurkan disana. Ini semua sudah dipenuhi oleh aspirasi program yang Bapak buat semuanya, bagaimana kami bisa masuk nanti ke sana ya kan. Apalagi kami sistem pembahasan kami kalau cuma kami bahas seperti ini yang dibicarakan cuma global global kami tidak masuk ke satuan tiga kami tidak bisa merubah itu ya.

Maka saya mengusulkan untuk teman-teman sekalian pembahasan 2024 nanti kami mesti harus melakukan konsinyering untuk membahas sampai ke satuan tiga, baru bisa kami merubah di situ ya kan tadi disampaikan. Saya ambil contoh ya ini ada Tahun Anggaran 2024 ada kegiatan perlengkapan jalan senilai 529 miliar di 33 Provinsi. Provinsi mana? Provinsi di republik ini ada 38 sekarang berarti ada 5 Provinsi yang tidak masuk ya kan, ini kan harus kami bahas sama-sama. Saya di Papua sudah ada 4 Provinsi baru, apakah masuk di sini? ya kan. Maka ini lah yang saya harapkan kita bahas itu ini harus terwakili secara adil pembagian itu ya kan. Daerah-daerah Provinsi yang sudah maju ya sudah tidak perlu ya kan, daerah Provinsi yang belum ini yang sangat membutuhkan. Apakah ada disini? bagaimana kami mau merubah itu kalau kami cuma membahas begini saja tidak akan merubah. Jadi saya minta teman-teman ini catatan penting untuk kita. Kita harus nanti setelah nanti Presiden menyampaikan nota keuangan kita, kita bahas harus merubah situasi untuk kita konsinyering.

Ya teman-teman ya ini catatan penting untuk kita semua saya minta. Agar kita bisa membahas sesuai amanat undang-undang untuk mendudukkan porsi di mana porsi kami sebagai anggota dewan yang membawa beban dari daerah kami masing-masing sebagai aspirasi masing-masing masyarakat di daerah kami untuk bisa tertampung di dalam APBN ini. Jadi itu catatan saya yang sangat saya ingin sampaikan, kalau tidak kita selalu berbicara di sini tidak ada habisnya. Cuman kami sampaikan itu angin lalu selalu tidak bisa merubah apa-apa padahal kami harus merubah gitu jelas nomenklaturnya harus ada.

Pembahasan itu disetujui dan tidak disetujui, jadi tidak harus selalunya kami setuju. Kalau ini selalu kami setuju semua apa yang saudara-saudara sampaikan.

Kami tidak tahu ini ke mana ini yang tadi saya sampaikan 500 sekian ini untuk 33 Provinsi ini, Provinsi kami ada nggak. Tanggung jawab saya dengan provinsi baru yang saya ikut mencetuskan itu di dalam perubahan Undang-Undang Otsus. Maka lahirlah empat Provinsi baru yang ada sekarang ini di Papua. Kalau mereka tidak mendapat keadilan saya berdosa, ini tanggung jawab. Maka saya sebagai Pimpinan saya minta kepada kita semua kita harus bisa membahas lagi ke depan 2024 ini tidak lagi seperti yang kita sudah lakukan selama ini. Selama ini alasan-alasan covid dan sebagainya kami masih bisa memaklumi itu tapi kedepan sudah tidak boleh lagi kami lakukan seperti itu dan kami harus kembali melakukan sesuai dengan amanat yang kami bebani.

Yang berikut tadi seperti tadi disampaikan ya kan. Saya sepakat apa yang disampaikan ini masalah BTS, nah ini kan kami harus revisi ya kan. Kalau kami bahas seperti sekarang ini ya kami tidak bisa merevisi karena kami tidak masuk ke sana. Tapi kalau kami bahas itu sampai ke satuan tiga minta persetujuan semuanya, ini setuju nggak tidak setuju kami *drop* dan selalu kami bahas di sini dengan selalu diberikan waktu. Kami bahas anggaran kok dipakai waktu, maka selalu harus cepat ini menyetujui ini harus cepat. Saya kira sekarang sudah tidak lagi covid kita bisa konsinyering untuk membahas jam sekian sampai selesai, belum selesai besok begitu.

Jadi ini yang mungkin saya ingin sampaikan ke teman-teman, kita baru bahas awal 2024 ini bukan dalam arti bahwa kami menyetujui itu tapi kami dapat memahami ingat saya ingat sampaikan anggaran yang sudah diberikan untuk kami membahas nanti setelah ada nota dari Bapak Presiden. Maka ini bukan satu yang sudah mati ya teman-teman saya ingin sampaikan. Jadi kami cuma dapat memahami untuk dibahas selanjutnya *gitu*.

Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi yang berikut saya ingin sampaikan kepada, saya pingin dialog dengan Dirjen Kereta Api. Saya pingin tahu Pak Dirjen, Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung ini sebentar lagi jalan. Itu stasiun akhir di Bandung itu sampai di mana Pak? boleh.

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Tegalluar.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Itu dari Kota Bandung berapa jarak.

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Kalau dari Kota Bandung sekitar 30 kiloan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Berarti dia bukan Bandung-Jakarta Pak karena dia tidak di Kota Bandung ya kan, betul nggak kan puluhan kilo dari Kota Bandung ya kan. Kalau dia Jakarta-Bandung ya harus dari Kota Bandung-Jakarta ya kan, ini kan kalau itu Cimahi ya daerahnya?

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Padalarang Pak.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Padalarang kan.

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Jadi 4 stasiun: (1) Halim, (2) Karawang, (3) Padalarang, (4) Tegal Luar.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Jadi tidak sampai ke Kota Bandung, bagaimana dibidang Bandung-Jakarta Kereta Cepat. Berarti kita harus di situ harus ngambil kendaraan lagi Pak ya baru masuk Bandung ya.

Kalau Jakarta?

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Jakarta Halim Pak di Halim.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Halim.

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Halim itu terintegrasi dengan LRT.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya kalau Jakarta oke ada LRT Halim konektivitasnya oke, tapi Bandungnya Pak ya kan. Saya terus terang agak tapi kita bicara Kereta Cepat Bandung ya masalahnya banyak. Saya tidak abis pikir ini apa ya dipakai Bandung-Jakarta padahal tidak sampai ke Bandung, puluhan kilo dari Bandung baru bisa sampai ke stasiun akhir di sana.

Saya kira ini juga harus menjadi catatan Pak, jangan kita buat nanti orang daerah yang kasian datang ke Jakarta mau ke Bandung pikir naik kereta api Jakarta-Bandung tahu-tahu tibanya belum sampai ke Bandung dia turun ya kan bingung dia nanti. Apalagi orang dari tempat saya jauh-jauh dari Papua bisa hilang di jalan dia di sana Pak. Kalau ada mahasiswa baru yang datang Jakarta pikir naik kereta bisa sampai di Bandung tahu-tahu sampai di sana belum sampai di Bandung, Bandung masih puluhan kilo lagi ya kan masih tukar lagi transportasi lagi. Saya kira ini tolong Pemerintah jangan buat itu menjadi bingung masyarakat ya. Jujur saja sampaikan Jakarta sampai ke mana gitu bukan Bandung ya kan jangan buat rakyat bingung gitu. Jujur kami sampaikan ini baru sampai di sini belum sampai ke Bandung *gitu* ya.

Saya kira ini catatan penting dan apa yang sudah disampaikan kami lihat semua bahwa ada indikasi itu dan sebagainya soal kereta cepat, ini catatan juga Pak. Jadi saya harap teman-teman di Dirjen Perkeretaapian harus lebih koreksi agar tidak lagi nanti proyek-proyek di tempat saudara-saudara itu selalu membengkak. Saya dulu juga pimpin bersama Pak Iwan Aras kami lihat kereta LRT ya yang dari Cibubur masuk Jakarta itu yang terjadi tabrakan itu. Saya juga bingung disitu anggaran pertama 21 triliun naik jadi 30 sekian triliun, membengkaknya tinggi sekali ya kan. Ini ada apa selalu dari pertama perencanaan sekian tiba-tiba bengkaknya sekian dan itu banyak sekali terjadi di teman-teman di kereta api, ini catatan kita semua saya kira. Maka kedepan saya minta supaya ini tidak terjadi lagi.

Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Pimpinan terima kasih. Dan saya satu lagi besok saya mimpin Pak Kunsfik ke Kediri, berbicara tentang angkutan jalan darat. Jadi tolong Pak Dirjen yang ikut nanti yang bisa punya kompeten yang baik jangan dikirim yang, ya kalau Pak Dirjen bisa ikut terima kasih Pak Dirjen. Baik saya kembalikan ke Pimpinan terima kasih mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih Pak Roberth.

Jadi Pak Dirjen saya kelompokkan di sini ada tiga pertanyaan. Yang pertama anggaran, kemudian tadi banyak tentang Dapil baik itu tentang sarana prasarana yang terkait dengan jalan kemudian kereta api, kemudian juga tentang sekolah.

Oleh karena itu saya minta kepada Pak Dirjen untuk menjawab secara umum saja. Kemudian nanti yang detail bisa tertulis karena ini juga masih pagu

indikatif yang seperti dikatakan Pak Roberth. Kita hanya bisa memahami kita belum menyetujui nanti setelah Presiden apa mengumumkan pidato kenegaraan baru kita akan lebih detail lagi kepada Eselon I. Iya saya persilakan yang pertama dari Pak Dirjen Perhubungan Darat silakan Pak.

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M):

Terima kasih Pimpinan waktu yang diberikan. Sebelum saya menjawab saya ingin menginformasikan Pak Roberth Pak. Jadi Kepala BPTD Papua itu kelahiran Jayapura Pak, mungkin nanti belum komunikasikan dengan Bapak aja, nanti komunikasi dengan Pak Roberth ya.

Kami ingin memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan Pak. Yang pertama tentunya kami mohon maaf kepada yang terhormat Anggota Komisi V apabila Kepala BPTD belum komunikasi, belum koordinasi di wilayah Dapil masing-masing dan dengan rapat pada siang hari ini saya yakin nanti akan berkomunikasi, akan merubah koordinasi lebih baik dengan Anggota Komisi V yang ada di daerah. Dan saya juga tentunya fungsi dari Anggota Komisi V mohon untuk bisa mengawasi apa yang menjadi program yang sudah di yang akan dan sudah dikerjakan di masing-masing Provinsi.

Untuk program Tahun Anggaran 2023 yang belum selesai yang tadi disampaikan masing-masing Kepala BPTD silakan dikomunikasikan dikoordinasikan ini masalah komunikasi di informasikan sehingga bisa selesai di daerahnya masing-masing. Dan memang ada beberapa hal yang perlu jawaban atau penjelasan dari instansi Kementerian lain yaitu masalah PJU, PJU yang beralih dari jalan nasional ke jalan Kabupaten yang akan dikerjakan atau dianggarkan dalam bantuan teknis, ini kami masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas tentang persetujuan itu Pak kami tidak bisa menyetujui secara sendiri tapi harus ada persetujuan dari dua Kementerian itu, ini yang sedang berproses persetujuan itu jadi bukan di tangan kami.

Untuk bus sudah kontrak Pak kami *insya Allah* dalam waktu ya kami Oktober mungkin sebelum ada 10 Februari atau akhir tahun ini sebelum akhir tahun ini sudah selesai semua sudah bisa didistribusikan Pak *insya Allah*.

Untuk BTS memang kami akan mengevaluasi yang tadi pertanyaan BTS banyak. Kami akan mengevaluasi untuk tahun 2024 secara keseluruhan BTS ya. Kami akan memperbaiki klausul kontraknya itu pasti dan kami akan bicara dengan Pemerintahan Daerah untuk *sharing* anggaran ya dengan Pemda. Karena BTS itu sebenarnya kalau lihat aturan hukumnya ya bukan tanggung jawabnya Kementerian Perhubungan karena trayeknya itu trayek lokal *gitu*, tapi kami menjadi *trigger* saja selama tiga tahun saya kira sudah cukup untuk men-*trigger* daerah tentang subsidi di BTS. Nanti kami akan mencoba untuk men-*sharing* anggaran dengan Pemda dan kami juga akan memanfaatkan Bus itu untuk di-*branding* dengan untuk mendapatkan

anggaran-anggaran yang lain. Mungkin sponsor atau apa di Bus kan masih kosong mungkin bisa di minta apa dijadikan bisa berbentuk anggaran-anggaran untuk mendukung operasional Bus *gitu*.

Jadi ketika *sharing* itu ada Pemda juga ikut bertanggung jawab terhadap program BTS itu dan perbaikan klausul kontrak juga nanti ada tanggung jawab di oprator. Sekarang sampai sekarang operator tidak bertanggung jawab mau kosong mau isi masa bodo yang penting *gua* dapat duitnya. Pemda pun begitu Pak sama saja itu kan urusan pusat bukan urusan saya, karena tidak ada *sharing* sama sekali kami akan mendorong *sharing* itu dan apabila dari 10 kota itu ada yang tidak sanggup akan saya tawarkan ke Pemda lain, mungkin ke Pekanbaru atau mana *gitu*. Padahal Pekanbaru sebenarnya menjadi contoh sebenarnya Pak, Pekanbaru sama Aceh Banda Aceh itu sebenarnya menjadi contoh itu. Banda Aceh sampai sekarang Pemdanya mensubsidi dan gratis itu luar biasa Banda Aceh, Pekanbaru juga sama, Pemda-pemda lain seharusnya bisa *gitu*, akan kami coba Pak perbaiki kedepan.

Yang kedua

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Pak Dirjen Banyumas nggak bagus ya itu BTS-nya. Karena nggak MoU-nya tahun 2025 MoU awalnya *gitu*, kalau

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.):

Iya nanti kita evaluasi.

Pertanyaan tadi berkaitan dengan masalah pemutusan sephiak. Anggaran kita kan 500 miliar, 500 miliar itu tidak bisa mencukupi sampai satu tahun, hanya sampai bulan Oktober. Maka ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil sebenarnya salah satu adalah mengurangi memperpanjang *headway*-nya atau mengurangi jam operasional sebagainya. Resikonya adalah pengurangan terhadap tenaga kerja. Surat yang masuk ke saya dari operator adalah meminta tenaga kerja itu yang ngasih pesangon adalah saya, ya nggak bisa kamu sudah dapat duitnya banyak tiap bulan saya kasih kok, ketika putusan hubung kerja saya harus menanggung juga kan tidak. Tapi untuk tahun ini saya *hold* dulu itu saya penuhilah nggak ada pemutusan hubungan kerja untuk tahun ini. Nanti sampaikan kepada operator nggak ada pemutusan hubungan kerja tahun ini *insya Allah*.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Keputusannya yang turunin tuh gajinya turun juga Pak.

**DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M):**

Ya mudah-mudahan tahun ini saya coba menyelesaikan itu tapi tahun depan saya akan mengevaluasi tentang kontrak dan sebagainya ya dan harus ada peran Pemerintah Daerah, nggak bisa Pemerintah Daerah diam saja tapi menuntut Kementerian yang lain harus ada peran ya. Kalau Pemerintah Daerah tidak mampu saya bisa melihat Banda Aceh sama Riau dan daerah yang lain juga mampu untuk bisa menggerakkan pertumbuhan transportasi di daerahnya. Ini untuk BTS.

Untuk Pelabuhan-pelabuhan yang tadi dimintakan sebagai Pelabuhan Haji terus Ulele dan sejenisnya sama itu masalahnya adalah pelabuhan-pelabuhan itu masih milik Pemerintah Daerah, bukan hanya Pelabuhan saja masih banyak banyak yang lain yang sama. Jadi berikan dulu apa selesaikan administrasinya data dukungnya dan serahkan kepada kami, kami nanti akan membangun itu dan kami akan serahkan lagi ke daerah. Tapi kalau itu masih milik daerah kami masuk ke anggaran yang ke situ nggak bisa tunggu dulu harus berubah dulu, tapi dengan catatan nafsu besar jangan tenaga kurang gitu.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Pak Kepala Balai, tolong direspon Pak Kepala Balai.

**DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M):**

Saya ke suatu daerah saya minggu kemarin ke suatu daerah saya melihat juga seperti permintaan itu dan itu sudah dibangun besar. Kalau daerah mengusulkan ya sewajarnya gitu jangan besar. Kami ke daerah kemarin Pemda minta besar ketika dikasih sampai hari ini tidak tidak berfungsi sama sekali, karena Pemda tidak bisa bayar listrik, tidak bisa ini ini tadi nafsunya awal-awalnya besar. Seperti itu yang perlu kita pelajari ketika ada usulan-usulan yang masuk dan kita lihat data dukungannya. Ketika data dukungannya udah oke saya yakin kita juga akan menganggarkan apa yang menjadi keinginan.

Yang terakhir untuk Tahun Anggaran 2024 dari Pak Roberth Rouw saya terima kasih ini kan masih indikatif nanti kami akan bahas kembali apa yang menjadi catatan dari Bapak tadi, untuk satuan tiga akan kami cek kembali agar lebih nanti bisa aspirasi-aspirasi Bapak mudah-mudahan bisa terakomodir. Dan kedepan nanti juga kami akan mencetak buku-buku tentang anggaran-anggaran di masing-masing wilayah akan saya sampaikan kepada Anggota Komisi V agar tahu di wilayahnya akan ada pembangunan apa bisa kami juga mohon untuk bisa bersama-sama mengawasi proses pembangunannya itu.

Saya kira itu Bapak terima kasih, waktu kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Iya selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dirjen Perkeretaapian.

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota yang kami hormati.

Pertama ada beberapa catatan dari kami.

Satu Pak dari Pak Sudewo bahwa tidak ada program untuk menutup Stasiun Gambir Pak. Jadi Stasiun Gambir tetap berjalan dan kami membuat Hub untuk semua perjalanan kereta api ada di Stasiun Manggarai yang *insya Allah* selesai tahun 2024 Pak, jadi tidak ada program untuk itu.

Yang kedua terhadap sarana luar negeri kemarin yang agak sedikit ramai Pak gitu. Jadi pada saat operator ingin mengusulkan pembelian kereta bekas ada aturan main dari Kementerian Perdagangan tidak boleh mengimpor kereta bekas yang umurnya di bawah di atas 20 tahun Pak. Jadi memang kereta bekas impor itu umurnya 20an 30 tahun jadi itu menjadi hambatan kemarin posisi agak ramai adanya larangan impor kereta bekas tadi. Namun itu sudah kami selesaikan Pak dengan revitalisasi kereta yang ada sekarang dan membeli yang baru bertahap sampai tahun 2027.

Selanjutnya terhadap pemanfaatan anggaran dari Bu Sri tadi. Bahwa anggaran kami memang terbagi dilaksanakan oleh balai-balai Bu, dimana terbagi atas untuk biaya perawatan, perbaikan prasarana dan peningkatan SDM, termasuk pembayaran subsidi. Nanti detailnya akan kami sampaikan Bu per balai berapa besar subsidi yang kami lakukan untuk pembayaran PSO dari operator dan termasuk perawatan. Jadi IMO atau infrastruktur *maintenance* dari prasarana.

Yang menarik dari Pak Irmawan maupun Pak Aceh Pak dari Pak Ruslan. Iya Pak nanti kami akan evaluasi Pak, karena sejujurnya kami ada perintah juga bahwa untuk semua pekerjaan harus selesai tahun 2024, yang kami evaluasi untuk kerjaan yang melewati 2024 ini masih kami kaji ulang Pak. Nanti Pak Ruslan maupun Pak Irmawan, Pak Kabag, kita akan diskusikan bagaimana yang tiga rute yang di usulkan dari Provinsi Aceh bisa kita timbulkan kembali Pak.

Bapak-Ibu sekalian.

Untuk Sulawesi Selatan Bapak tetap berjalan programnya Bapak tapi memang kami sedang mempersiapkan arah Made-Maros dan tahun ini Bapak bulan ini mungkin awal bulan Agustus akan menambah satu *train set* kereta penumpang Pak untuk kereta di Sulawesi Selatan. Dan kita juga akan memulai

di pertengahan tahun ini kereta angkutan barang dari pabrik sampai ke Pelabuhan Yarangkong. Jadi untuk perkembangan di Sulawesi Selatan cukup bagus Pak penumpangnya juga selalu meningkat, maka bulan ini *insya Allah* menambah satu *train set* dari perkeretaapian.

Selanjutnya terkait dengan Bu Novi Bu. Iya nanti kami Padat Karya kami akan selalu koordinasikan. Dan hari ini kawan-kawan Kepala Balai hadir bisa mendengarkan secara langsung apa yang menjadi harapan Bapak-Ibu sekalian untuk selalu meningkatkan koordinasi dengan Bapak-Ibu Anggota Dewan di Dapil supaya tidak tertinggal satu persatu. Dan itinya Bu kawan-kawan siap dan kami mohon maaf juga kalau memang masih ada kekurangan kawan-kawan di dalam berkoordinasi dengan Bapak-Ibu sekalian di Dapil.

Terhadap kereta cepat Pak, kami ulangi Perkeretaapian Jakarta-Bandung dan LRT Jabodetabek tahun ini akan dioperasionalkan. LRT akan dioperasionalkan pada tanggal 18 Agustus bersama dengan TOK atau tanggal operasi kereta api LRT, kami juga akan melakukan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Namanya tetap Jakarta-Bandung namun kereta itu nantinya akan tetap kita programkan sampai ke Surabaya Pak melewati Jogja. Untuk yang ke Bandung integrasinya ada di Stasiun Padalarang Pak, di situ kami siapkan *Feeder* memang tidak di Tegalluar karena jaraknya cukup jauh maka dengan *Feeder* nanti dari Tegalluar dari Padalarang ke Bandung itu memakan waktu 15 menit. Totalnya Jakarta-Bandung memerlukan waktu 39 menit Pak dengan kereta cepat ini. Itu bapak yang terkait kereta cepat Jakarta-Bandung.

Selanjutnya Makassar-Parepare seperti tadi posisinya Bapak, nanti kami lanjutkan. Terhadap angkutan barang kereta Pare-pare ini juga menjadi pelajaran buat kami, karena konsep kalau angkutan barang akan berbeda dengan lainnya. Kedepannya ini kami di Makassar akan menaikkan truk ke atas kereta Pak, ini juga nanti bekerja sama dengan Dirjen Perhubungan Darat, karena itu juga akan mengurangi kepadatan jalan mengatasi ODOL Pak. Jadi di Makasar – Pare-pare itu sekaligus juga menghilangkan *triple handling* di dalam penanganan angkutan barang di Sulawesi Selatan yang akan kita laksanakan juga di tahun ini.

Untuk Pak Djadi terhadap rel kereta Kutoharjo Pak. Iya memang tadinya harapan Pak Menteri itu peresmiannya bisa bersamaan dengan terminal Purworejo Pak kita harapkan itu dan ini sudah berjalan untuk melakukan studi untuk penanganan reaktivasi jalur Kutoharjo

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Interupsi Pak, intrupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Sudjadi.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Ini yang reaktivasi ya?

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Iya iya Pak.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Alhamdulillah jadi kita nanti kita bantu dengan kata biar tidak ada gangguan, saya minta Kepala Balai diikuti ya. *Nggih*, terima kasih.

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RIZAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Siap Bapak, untuk Pak Ruslan tadi Pak kita akan evaluasi Pak terkait tadi, karena kami harus menyelesaikan program tidak boleh menyelesaikan tahun 2024. Kita lihat dari tiga tadi Lhokseumawe-Bireun, mana yang bisa kita utamakan dan tahun 2024 ini kita akan memulai menambah perjalanan kereta perintis dari itu sampai ke Bireun Bapak.

Selanjutnya Pak Aras juga seperti tadi Pak Makasar – Pare-pare kita masih terus berlanjut pembangunannya dan tadi kereta perintis akan kita tambah di akhir bulan ini sudah ada dua KA perintis yang akan beroperasi di Makasar – Pare-pare dan berikutnya kereta angkutan barang juga akan kita mulai di Makasar – Pare-pare.

Berikutnya juga untuk Pak Hamka, mohon maaf Pak sekali lagi atas ketidaknyamanan dari staf kami *insya Allah* ini menjadi pembelajaran yang mahal bagi kami. Kami akan evaluasi kawan-kawan Kepala Balai untuk agar lebih bisa lebih berkoordinasi dengan Bapak-Ibu sekalian.

Pak Djadi sudah terjawab tadi Pak ya untuk yang KA Kutoharjo kita akan lakukan dan arahan Bapak untuk bagaimana kami untuk tidak melanggar hukum dan jauhi korupsi dan *insya Allah* Pak ini kami akan pegang teguh, kami akan terapkan kepada teman-teman yang ada di lapangan.

Selanjutnya Pak Ruslan sudah, Pak Fauzi juga sama ya Pak *insya Allah* kereta Makasar – Pare-pare akan terus berjalan pembangunannya tidak ada keterlambatan.

Untuk Pak Fadhli jalur Tuntang Gunung Jati kami perhatikan Pak ini juga sedang kami evaluasi untuk keberlanjutannya untuk pelaksanaan beroperasinya kereta api di jalur Tuntang sebagai angkutan KA Wisata.

Sementara itu Pak Sumail, siap Bapak untuk jalur Situbondo dan Banyuwangi kemarin terakhir memang kita menyiapkan fasilitas integrasi dari

terminal Banyuwangi untuk sampai ke Pelabuhan Banyuwangi Pak. Nanti untuk detailnya kami sampaikan ke Pak Sumail perkembangan untuk wilayah Situbondo dan Banyuwangi.

Nah, PNBP Bapak, kami memang masih rendah Bapak-Ibu sekalian. Ada perintah Pak Presiden bahwa kami untuk tahun ini tidak memungut TAC Pak. Jadi kalau tidak memungut TAC artinya kami kehilangan anggaran sekitar 1,2 triliun dari TAC. Karena apa, karena operator PT. KAI membutuhkan anggaran untuk mendukung biaya operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, makanya Pak Presiden menugaskan kami untuk tidak memungut TAC di tahun 2023 ini pada operator. Jadi kemungkinan besar sekali TAC kami akan rendah namun kami sedang mencari alternatif-alternatif lain bagaimana tetap PNBP kami tetap bisa terpungut melalui bagaimana pemanfaatan aset dan pengujian yang kami lakukan terhadap sarana-prasarana maupun peningkatan SDM. Untuk biaya pembangunan pun kami mencoba mencari pembelian alternatif dengan kerja sama antara swasta Pak, dalam bentuk investasi.

Demikian secara ringkas Pak *highlight* dari jawaban atas pertanyaan Bapak-Ibu sekalian, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Saya kira untuk Kepala Badan BPSDM dan Kepala Badan Pengelola tadi kan sifatnya ada masukan Pak, masukan dan saran saya kira tidak perlu dijawab. Dan saya kira juga tidak ada lagi pertanyaan dari para anggota maka kita masuk kepada draf kesimpulan. Tolong ditampilkan

**DRAF KESIMPULAN RDP PADA HARI INI
RABU, 5 JULI 2023**

1. Terkait dengan evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 Komisi V DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, BPTJ dan BPSDM-P Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, di mana capaian per 30 Juni 2023 sebagai berikut:
 - 1) Dirjen Perhubungan Darat, realisasi keuangan 38,22%, realisasi fisik sebesar 40,78%.
 - 2) Dirjen Perkeretaapian, realisasi keuangan sebesar 30,54%, realisasi fisik sebesar 34,4%.
 - 3) BPTJ, realisasi keuangan sebesar 48,67% realisasi fisik sebesar 52,30%.
 - 4) BPSDM-P, realisasi keuangan sebesar 36,45%, realisasi fisik sebesar 40,21%.

Saya berharap dari Eselon I yang ada di sini yang capaian realisasinya belum mencapai 50% kita harapkan bisa tercapai dan mudah-mudahan akhir tahun sesuai dengan target yang kita inginkan bersama.

2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPTJ, dan Kepala BPSDM-P Kementerian Perhubungan mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
 - 1) Dirjen Perhubungan Darat Pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2024 sebesar 13.716.423.094.000 Pagu Indikatif sebesar 6.642.244.664.000 selisih *backlog* sebesar 7.000.074.218.430
 - 2) Dirjen Perkeretaapian Pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 15.039.689.316.000,00 Pagu Indikatif sebesar 9.685.137.880.000 selisih *backlog* sebesar 5.354.550.836.000
 - 3) BPTJ Pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2024 sebesar 747.514.226.000 Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar 329.875.301.000 selisih *backlog* sebesar 417.638.925.000
 - 4) BPSDM-P Pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.691.680.897.000, Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar 3.694.631.934.000 selisih *backlog* sebesar 4.997.048.963.000
3. Komisi V DPR RI sekat dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPTJ dan Kepala BPSDM-P Kementerian Perhubungan untuk menyesuaikan rincian program dan menyampaikan RKA K/L masing-masing Eselon I dalam nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024.
4. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, BPTJ dan BPSDM-P Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Komisi V DPR RI dalam pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

Ada empat draf saya persilakan kepada Pemerintah terlebih dahulu

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Sebentar Pak, saya bukan usul hanya mengingatkan saja. Dulu namanya program Padat Karya Tunai itu meniru zaman Malaysia di Amerika Presidennya Roosevelt saya ikut memberi masukan itu. Sehingga pada waktu resesi itu lalu bagaimana orang yang tidak punya pendapatan itu disuruh ini, tetapi sekarang tren-nya itu bukan PKT tapi pekerjaan rutin. Mungkin Pak pindah aja ke pegawai rutin, ngapain PKT caranya ngontrol *gimana*. Karena PKT itu rumusnya dulu yang pekerja orang luar di data terus di gaji, Anggota Komisi tahu oh ini ini. *Nah*, seperti kereta api itu masukan *anu* aja pekerjaan

apa itu rutin aja, jadi *ndak* bingung. Saya khawatir kalau itu tidak rutin bisa manipulasi loh Pak. Sudah Anggota Komisi V nggak tahu kok mana, misalnya membersihkan terminal itu rutin Pak. Jadi saya ikhlas nggak usah PKT ini karena kalau PU sih jelas. *Nah*, jadi kalau di kereta api agak susah dipaksa-paksakan untuk ini, ini sekedar usulan saja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Sudjadi terima kasih usulannya nanti kita bahas pada waktu kita membahas per Eselon I. Saya silakan ke Anggota untuk menanggapi.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Iya tadi pembicaraan kita di antara pembicaraan masalah BTS dan itu ditanggapi positif oleh Pak Dirjen. Supaya kesimpulan kita ini agak menggigit gitu jangan normatif *gitu*. Jadi alangkah baiknya juga dibuat disini supaya kita terjadwal pasti akan terjadwal nanti agar kita buat di sini bahwasanya program BTS kita evaluasi bersama dengan Dirjen secara khusus. Agar tadi luar biasa itu pemikiran Pak Pak Dirjen bahwasanya terlalu manja, belum tentu juga itu adalah kewenangan pusat tetapi luar biasa satu daerah 50 miliar per tahun *gitu nah*, harusnya Pemerintah Daerah ikut. *Nah*, ini maksud saya jangan kita masukan dalam pembahasan secara umum ini, kita buat ini dana luar biasa besar begitu. Jadi kalau bisa supaya mengikat ini kita jadwalkan penjadwalan untuk evaluasi bersama, nggak ada niat-niat yang lain evaluasi bersama itu kita buat di dalam kesimpulan rapat kita hari ini.

KETUA RAPAT:

Nggak, saya kira begini Pak Syahrul. Saya sangat sepakat ya dengan ide Pak Syahrul tetapi ini kan masih pembahasan pagu indikatif kita masih umum. Saya harap nanti pada waktu kita setelah Presiden membacakan nota keuangan kita akan rapat lagi baru kita rapat nanti dengan Pak Dirjen kita detail, kita detail membahas tentang program-program tadi seperti dikatakan Pak Roberth tadi, di situ baru kita bahas kira-kira apa usulan kita apa usulan dari Pemerintah seperti itu Pak.

Cocok ya Pak, Pak Syahrul? Ini masih pagu indikatif Pak, kita belum menyetujui ini masih kita ini bahasa kita masih memahami artinya masih kita pahami ini, setuju ya.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Memang saya salut pada Pimpinan itu halus tapi hampir semua marah tapi kesimpulan di nomor tiga cukup menyejukan.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Pimpinan

KETUA RAPAT:

Iya ada lagi Pak, silakan.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Apa yang disampaikan Pak Syahrul tadi itu menarik sebenarnya tapi posisi sekarang ini biarkan memang seperti ini karena masih ada pembahasan detail selanjutnya, ini masih pembicaraan pendahuluan. Sehingga konsep-konsep kita saya kira dari tim ahli juga dari Kementerian ataukah tim dari kita ini mencoba merumuskan sehingga dipertemukan pada satu titik nanti dalam pertemuan.

Makasih.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Ini keadaan seperti ini berulang setiap tahun Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Iya mudah-mudahan tidak berulang.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Mudah-mudahan tahun ini jelas ya.

KETUA RAPAT:

Ada lagi? Apa cukup dari Anggota? cukup ya. Dari Pemerintah Pak apakah ada tambahan atau yang perlu diperbaiki.

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M):

Cukup Pak, cukup terima kasih

KETUA RAPAT:

Baiklah Bapak-Ibu hadirin-hadirin sekalian dengan disetujuinya draf kesimpulan maka draf ini kami sepakati.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati.

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan, kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan.

Sebelum rangkaian acara ditutup hari ini maka kami berikan kepada Pemerintah dalam hal ini Pak Dirjen, Pak Dirjen Perhubungan Darat mewakili Pemerintah untuk memberikan *closing statement*, silakan Pak.

**DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi V beserta Wakil Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.**

Kami menyadari rincian rencana kegiatan anggaran tahun 2024 yang telah kami susun masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan akan kehadiran pelayanan jasa transportasi. Namun dengan ketersediaan anggaran yang ada kami telah melakukan pemilihan kegiatan secara proporsional berdasarkan prioritas kebutuhan dan usulan yang memiliki kelengkapan persyaratan dokumen dan data dukung.

Saya bersama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian dan Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat yang telah disampaikan kepada kami. Selanjutnya akan kami tindak lanjuti dengan melakukan penajaman terhadap usulan kegiatan dimaksud sehingga dapat ditampung dalam rencana kegiatan anggaran di tahun 2024. Di forum ini kami mengharapkan dukungan penuh Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR yang terhormat agar kami dapat terus bekerja keras mencapai tujuan yang sama yakni merumuskan kebijakan dalam menyusun rencana kegiatan anggaran tahun 2024, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kesejahteraan serta bermanfaat sepenuhnya bagi masyarakat.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktu kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Demikian hari ini rapat dapat kita tutup dengan mengucapkan terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB)

JAKARTA, 5 Juli 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002